

I NDONESI AKU I NDONESI AMU



bahan kajian refleksi sebelum kita melakukan sesuatu

Babad Tanah Air

...seperti digambarkan oleh musik tradisional, kalian selalu menunggu pemimpin yang akan membawa ke kejayaan, bukannya tiap orang mengatakan bahwa dialah pemimpin yang membawa kepada kejayaan itu...

- dialog dalam roman "**BUMI MANUSIA**", Pramoedya Ananta Toer -

Indonesia: tragedi atau kenangan manis?

Sejarah nasional menunjukkan sebuah kontinuitas yang membawa Indonesia kepada situasi yang kita alami sekarang ini. Lebih dari 350 tahun dijajah oleh kolonial Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang, dan diikuti dengan penjajahan oleh bangsa sendiri oleh pemerintahan Orde Lama Presiden Soekarno (1945-1966) dan kemudian oleh pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto (1966-1998). Dua orang ini tentu menjadi penanggung jawab utama oleh kerusakan superstruktur bangsa yang terjadi saat ini. Mereka menjadi penguasa dalam waktu yang lama sekali, yang seharusnya membawa bangsa Indonesia yang sudah sangat terbiasa dengan pola feodalisme yang diterapkan kolonial.

Tak bisa dipungkiri bahwa klaim bahwa Indonesia adalah daerah bekas jajahan kolonial Belanda dari Sabang sampai Merauke adalah absurd. Seperti diutarakan berbagai buku sejarah nasional, Indonesia lahir oleh sebuah semangat proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta, sebuah semangat yang lahir dari sebuah perasaan senasib sepenenderitaan imperialisme dan kolonialisme.



Deklarasi kemerdekaan 1945 tentu saja sangat membius dan memuncakkan perasaan bersatu penduduk bangsa di teritori Sabang hingga Merauke ini. Semua pihak akhirnya menerima saja negara kesatuan dengan bentuk negara republik ini; tentu saja faktor keahlian retorik dari Soekarno sebagai presiden RI pertama merupakan faktor yang tak bisa diabaikan dalam proses meyakinkan berbagai kalangan ini. Soekarno dan Hatta menjadi dwi-tunggal yang menjadi pahlawan persatuan dan kesatuan. Sebelumnya keinginan untuk bersatu telah dikumandangkan oleh golongan muda se-Indonesia pada tahun 1928, dalam bentuk Sumpah Pemuda yang mengikrarkan semangat satu bangsa, tumpah darah, dan bahasa; hal ini jelas sebagai trik untuk mengintegrasikan perjuangan nasional yang secara sporadis tidak menguntungkan saat itu.

Sejarah juga mencatat bahwa sebelum-sebelumnya banyak pemimpin perjuangan nasional "kebingungan" untuk menyusun kekuatan nasional yang integratif dalam merongrong pemerintahan kolonial. Budi Utomo (1908) gagal karena ternyata menjadi sedemikian eksklusif di kalangan intelektual Jawa saat itu, demikian pula Indische Partij, Partai Nasional Indonesia, dan seterusnya. Mungkin satu yang agak berhasil adalah yang dilakukan oleh H.O.S. Cokroaminoto, ia mengambil ikon Islam dalam melawan penjajah yang dikafirkan dalam bentuk organisasi Sarekat Islam (SI). Islam menjadi ikon yang efektif hingga akhirnya ini pun runtuh karena ketidaksiapan para pemimpinnya sewaktu pengaruh komunis masuk melalui aktivitas Partai Komunis Indonesia yang mengorganisir buruh dan petani dalam perspektif ekonomi. SI pecah menjadi SI merah dan SI putih, dan

luluhlah sebuah harapan SI akan membawa integritas nasional melawan penjajahan.

Akhirnya semangat nasionalisme bisa memuncak oleh aktivitas berbagai organ pemuda dan intelektual dalam bentuk paguyuban pemuda di luar negeri maupun partai politik, dan kita mengenal banyak nama-nama besar di sini, mulai dari Soekarno, M. Hatta, Sjahrir, Syarifuddin Prawiranegara, M.H. Thamrin, Agus Salim, dan sederet nama-nama pemimpin nasional lainnya yang bercita-cita untuk kemerdekaan Indonesia.

Vacuum of power akibat kalah perangnya Jepang tahun 1945 oleh tragedi jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki menjadi momen *partus*-nya Indonesia ini. Perdebatan antara golongan muda dan golongan tua (baca: hanya segelintir rakyat Indonesia yang saat itu berjumlah sekitar 800.000 jiwa) akhirnya melahirkan deklarasi kemerdekaan sepanjang dua kalimat magis hasil ketikan Sayuti Melik yang memerdekakan dan melahirkan Indonesia. Semua prajurit perang nasional yang ada di seluruh pelosok tanah air, yang sedang bergerilya, mengaminkan kemerdekaan ini, dan lahirlah Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan penetapan UUD 1945 sebagai UUD sementara karena memang terlalu ringkas untuk mengatur ketatanegaraan sekomples Indonesia.

Soekarno secara aklamasi menjadi pemimpin nasional, tak ada yang menggugat hal ini. Dalam beberapa tahun kabinet negara diombang-ambingkan oleh pergantian perdana menteri dengan sistem pemerintahan parlementer yang memang dianut saat itu, namun posisi Soekarno menjadi tak terbantahkan lagi. Soekarno mengeluarkan dekret presiden 1959 saat Konstituante tak mampu menghasilkan UUD pengganti UUDS 1950, dan ia mengembalikan konstitusi kepada UUD 1945, ia bubarkan parlemen, dan seterusnya, mengukuhkan posisinya sebagai penguasa tunggal yang tak terbantahkan. Puncaknya adalah saat ia akhirnya diputuskan sebagai presiden seumur hidup: sebuah hal yang menginjak-injak komitmen pertama bahwa Indonesia menganut paham demokrasi dalam bentuk republik.



Pada akhirnya, Indonesia kita akan menjadi sebuah kenangan manis momentum lepasnya kita dari belenggu penjajahan, meski perjalanan sejarah pada akhirnya memaparkan sebuah tragedi yang kita lihat saat ini... masih bersimbah darah.

Babakan Soeharto: melanjutkan pembodohan Soekarno

Soekarno akhirnya jatuh oleh insiden yang hingga sekarang tak jelas juntrungan kebenarannya: Gerakan 30 September 1965 oleh PKI yang saat itu dipimpin D.N. Aidit. Apakah angkatan darat, dalam hal ini Soeharto melakukan *coup d'etat* atau PKI berniat melakukannya namun digagalkan oleh kesigapan Letjend. Soeharto oleh karena pusat komando Jend. Ahmad Yani absen oleh karena penculikan PKI atau skenario lainnya, tak ada satu orang pun dari generasi muda saat ini yang mengetahuinya. Bahkan Buku Putih Sejarah Penumpasan G 30s/PKI yang diterbitkan pemerintahan Orde Baru pun dinilai masih tendensius untuk menutupi borok-borok keberadaan dirinya dari permasalahan itu.

Yang pasti, Orde Baru menjargonkan anti komunismenya karena diduga membawa aliran ateisme yang bertentangan dengan ide dasar negara Pancasila, dengan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah musuh bersama yang dijargonkan oleh rezim Orde Baru, yang seolah semakin mengukuhkannya sebagai pembuka pintu terhadap kapitalisme yang bersifat internasional: kapitalisme global.

Soeharto mungkin sedikit lebih cerdas daripada Soekarno dalam rangka mempertahankan posisinya. Ia berusaha agar tetap "konsisten" terhadap konstitusi yang memang terlalu ringkas itu. Ia tidak menetapkan dirinya sebagai presiden seumur hidup, namun mengatur konstitusi agar tetap berkibalt kepada dirinya. Jargon-jargon dikumandangkan sehingga ada sentimen kebencian yang –

mungkin dapat dikatakan berlebih-lebihan – terhadap ideologi komunis dan ini menjadi tema utama **awal** kekuasaannya. Semuanya harus sesuai dengan konsistensi Orde Baru yang menjalankan Pancasila dan UUD'45 secara murni dan konsekwen. Penyingkiran-penyingkiran kepada beberapa saksi hidup peristiwa G-30S/PKI yang meroketkan namanya disingkirkan, antara lain Sarwo Edhie Wibowo, A.H.Nasution, dan seterusnya sehingga posisinya benar-benar sentral dalam upaya kembalinya struktur pemerintahan kepada “khittah”-nya: Pancasila dan UUD'45. Hal ini berkenaan dengan genealogi sejarah nasional, di mana terjadi kesimpangsiuran dalam catatan sejarah nasional. Kurikulum pendidikan nasional diobrak-abrik dengan pemutaran balikan fakta sejarah maupun hal-hal normatif dalam pengertian “oposisi” dalam ketatanegaraan, “demonstrasi”, ideologi komunis yang ateistik yang menimbulkan komunis-fobia yang berlebihan di masyarakat, dan sebagainya. Bisa dibayangkan bagaimana “rupa” intelektualitas masyarakat hasil pendidikan orde baru ini (!).

Lebih lanjut, jargon selain itu yang juga dikumandangkan adalah stabilitas yang menjadi prasyarat utama dalam proses pembangunan yang dijalankan oleh tiap Pembangunan Lima Tahun (PELITA) yang dijalkannya. Di sini terjadi pemutaran fakta yang begitu menyeramkan dalam implementasi dwifungsi ABRI¹. Penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Timor-timur, dan Irian Jaya. Pembunuhan massal di Lampung, Tanjung Priok, Santa Cruz Dilli (1991), peristiwa pendudukan kantor DPP PDI di Jakarta (1996), tragedi 13-15 Mei Jakarta, Tangerang, dan Solo (menewaskan lebih dari 1800 orang), peristiwa Semanggi (1998), dan berbagai kerusuhan sosial berbau SARA yang disinyalir merupakan rekayasa rezim Orde Baru. Demi stabilitas, maka kekerasan militer menjadi halal bahkan mutlak diperlukan. Pembangunan yang dijalankan pun ternyata pembangunan yang meliputi pembangunan fisik dan sangat tidak merata pula.



Pembangunan fisik seolah jauh lebih penting daripada pembangunan suprastruktur masyarakat pengguna hasil pembangunan fisik ini. Lihat saja pembangunan jalan layang, telepon umum, dan berbagai infrastruktur lainnya seperti mobil mewah, sistem telekomunikasi bergerak, dan sebagainya yang hanya menjadi makanan mereka yang mapan ekonominya, sementara yang miskin akan tetap miskin dan secara horizontal di antara masyarakat terjadi berbagai potensi konflik antara mereka yang miskin terhadap yang kaya.

Lebih jauh lagi, Soeharto ternyata tidak melakukan itu tanpa sesuatu keuntungan bagi dirinya (atau keluarganya). Sudah menjadi rahasia umum bahwa ternyata kompleks pemukiman rumahnya di Jalan Cendana Jakarta menjadi kompleks mewah dengan keamanan superketat. Anak-anak, keponakan, dan berbagai sanak keluarganya jauh atau dekat “kecipratan” dengan jabatan kepresidenan yang dipangkunya. Keluarga Soeharto menjadi pemilik negara ini secara *de facto* yang tentu saja diperkuat oleh produk-produk hukum yang membenarkan hal itu. Kekayaan Soeharto dan anak-anaknya diperkirakan berjumlah US\$ 15 milyar (majalah *Time*, 17 Mei 1999).

Tiga puluh dua tahun lamanya ia berkuasa, dan bukan sebuah rahasia lagi ia menjadi dalang pembodohan massal di negeri ini, namun hingga hari ini, berjalan tiga tahun semenjak turunnya ia dari jabatan kepresidenan, ia tidak dapat dijangkau oleh hukum yang ada.



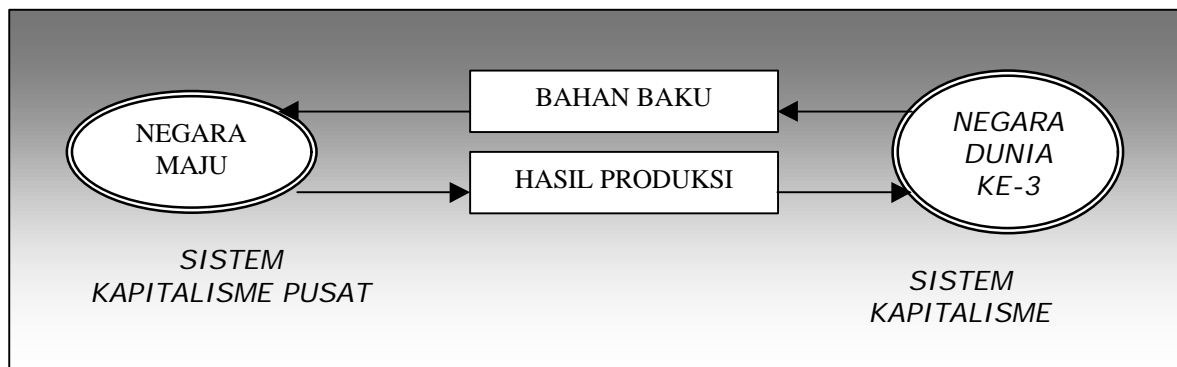
¹ Lebih lanjut baca pembelaan dalam pengadilan mahasiswa ITB 1978, Indro Tjahjono, “**INDONESIA DI BAWAH SEPATU LARS**”, DM ITB 1978.

Pengkajian masalah ini bisa menjadi sebuah pewacanaan yang sangat panjang, karena sistematika yang dijalankan Soeharto untuk mengukuhkan keberadaan dirinya selama menjadi presiden memang dapat dikatakan cerdas.

Pertama, ia mengendalikan isi kepala hampir seluruh rakyat Indonesia dengan pembakuan-pembakuan kurikulum pendidikan nasional dengan segala pembodohan politiknya. Selama ia berkuasa orang takut untuk menyuarakan sesuatu yang menurutnya benar namun di lapangan ternyata melawan arus. Ia juga mengendalikan informasi yang ditelan oleh rakyat. Ia menguasai secara sentralistik Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang sangat menjangkau hampir seluruh kawasan Indonesia dan Radio Republik Indonesia (RRI). Bahkan selama ia berkuasa, pemberitaan televisi dan radio swasta pun harus melalui corong TVRI dan RRI. Media komunikasi lain pun demikian. Majalah yang ingin mencoba-coba melawan dapat dengan mudah dicabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)-nya. Mereka-mereka yang ingin menggugat Soeharto dihajar habis-habisan. Monumen pendudukan militer di kampus ITB (1978) mungkin salah satu contohnya, saat mahasiswa ITB menyatakan tidak percaya lagi kepada kepemimpinan Soeharto. Diciptakan berbagai paranoia masyarakat untuk angkat bicara dan melawan rezim penguasa. Ia juga tidak segan-segan menggunakan militer untuk membasmi pihak-pihak yang mengganggu keberadaannya yang dalam terminologinya adalah stabilitas nasional.

Kedua, ia juga tidak secara terang-terangan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Secara halus melalui peraturan pemerintah yang ia keluarkan secara konstitusional, melalui yayasan milik sanak keluarganya, melalui proyek keluarganya atau orang-orang didekatnya. Ini menjadikan sebuah kesadaran bahwa adalah "biasa" untuk melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ini jelas melahirkan kondisi multilevel totalitarian secara vertikal di tengah masyarakat: mulai dari presiden hingga tukang parkir melakukan praktik KKN ini dan ini menjadi suatu "budaya" tersendiri di tengah masyarakat. Ini pula yang menyebabkan sulitnya menjaring Soeharto, karena walaupun ia sekarang sudah tidak menjabat lagi, orang-orang yang menjadi penguasa sekarang adalah mereka yang dulunya juga berlindung dibalik jubah Soeharto dan juga tak luput dari eksistensi kepresidenan Soeharto. Tiga puluh dua tahun berkuasa, dan ia secara tak langsung telah menciptakan sebuah kondisi sedemikian selama beberapa generasi, dan generasi muda sekarang adalah generasi yang dibesarkan oleh generasi sebelumnya yang sedemikian korup.

Ketiga, pola-pola developmentalisme yang terjadi di kalangan masyarakat yang juga adalah hasil pendidikan yang diciptakannya, jelas telah mengarahkan pola pikir generasi tua dan muda dalam memandang sistem nasional. Sebagai negara, Indonesia telah "dipaksa" meninggalkan "jati dirinya" sebagai negara agraris menjadi negara industri maju yang dapat dikatakan "mengekor" negara-



negara yang menanamkan modalnya di Indonesia. Pembentukan pola pikir yang cenderung inferior jika berhubungan dengan teknologi negara maju, sehingga seluruh aspek kehidupan nasional diarahkan ke sana tanpa memperhatikan lagi super struktur masyarakat yang terbangun sejak awal. Ini mendorong tingkat konsumerisme yang setinggi-tingginya yang memang diharapkan investor sehingga Indonesia menjadi pasar bagi produk-produknya.

Ini sangat menyamankan posisinya karena pola kapitalisme global terkompromikan oleh kedudukan politisnya. Indonesia menjadi negara kapitalisme pinggiran, ia dan kroninya dapat terus korupsi, dan rakyat tersilaukan oleh pembangunan fisik yang dilakukannya. Rakyat terbisukan oleh kemajuan yang ada dan secara politis menjadi tunduk kepadanya. Lebih jauh, karena praktik KKN telah menjadi warna tersendiri dalam dunia politik, ada ketakutan-ketakutan di kalangan masyarakat untuk berkiprah di dunia politik, padahal politik seharusnya merupakan cara paling efektif dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai warga negara. Negara yang umurnya baru beberapa dekade ini akhirnya menyerah pada kemajuan sistem teknologi, pertanian ditinggalkan, terjadi ledakan urbanisasi tiap tahun; dan ini menyimpan potensi konflik sosial yang sangat tinggi, namun teredam oleh pola militeristik yang berkembang. Kehidupan sosial politik menjadi tidak menarik, ideologi alternatif menjadi menakutkan, dan yang terjadi adalah ikon-ikon agama yang secara dogmatis dan pasti membisukan keinginan rakyat memperjuangkan hak-haknya. Lembaga swadaya masyarakat, parlemen (DPR), partai politik, dan berbagai perangkat sosial lainnya tak bisa tidak mengaminkan penguasa sehingga perhatian rakyat tertuju ke kampus-kampus sebagai aspiratornya. Sewaktu ini terjadi, kampus diduduki militer, dilaksanakan normalisasi kehidupan kampus (NKK 1978) dan rakyat kembali bisu dalam ketakutan.

Keempat, sistem demokrasi kita juga telah disalahkaprahkan dan ini dikampanyekan secara nasional dalam berbagai Penataran P4, acara televisi, kurikulum nasional, sehingga tidak jelas fungsi kontrol antar lembaga-lembaga pemerintahan yang ada: antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ini sangat menguntungkan lembaga kepresidenan yang terpisah dari rakyat namun memiliki "hak intervensi" terhadap lembaga tinggi negara lainnya. Dengan kata lain, fleksibilitas UUD'45 telah diselewengkan dengan pengertian yang jauh dari cita-cita demokrasi dan republik.

Habibie dan GusDur: penerima ampas Soeharto

Gejolak rakyat dan mahasiswa 1998 dengan latar belakang krisis ekonomi, serta berbagai tekanan politik di dalam dan luar negeri telah memaksa Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Namun skenario turunnya pun telah diatur sedemikian rupa. Soeharto mengundurkan diri, namun tongkat estafet ini diserahkan kepada Habibie yang menjadi wakil presidennya waktu itu.



Habibie jelas merupakan orang Orde Baru dan kedekatannya dengan Soeharto sudah tak asing lagi. MPR dan DPR-pun sebagai tempat orang-orang Soeharto sangat tidak disentuh oleh lengsernya Soeharto ini, sehingga Soeharto boleh dikatakan selamat oleh "amuk massa" yang secara potensial terjadi.

Sebagaimana dijabarkan di atas, selama Soeharto berkuasa telah dibentuk pola masyarakat dengan budaya yang secara multilevel totalitarian, ditambah beberapa aspek pola hidup demokrasi yang telah disalahkaprahkan dengan terminologi melaksanakan Pancasila dan UUD '45 secara murni dan konsekwen, ketakutan akan konflik dan berbagai perdebatan dalam urusan bernegara baik di



tingkat elite maupun di tingkat rakyat umumnya, akhirnya selalu mengharapkan adanya kompromi di tingkat elite yang pada akhirnya akan mereduksi masalah menjadi masalah elite politik dan memisahkan rakyat kepada permasalahan bangsa dan negara. Rakyatnya sendiri akan pasrah oleh ikonisasi yang terjadi. Pertemuan Ciganjur 1998 merupakan contoh implementatifnya dalam hal ini. Pertemuan Ciganjur yang

mempertemukan para elite politik, dalam hal ini yang dianggap tokoh masyarakat di meja perundingan, telah mendistorsi permasalahan yang ada menjadi diskursus di tingkatan elite. Revolusi menjadi gagal terjadi – berhubung pemaknaan “revolusi” telah sangat menakutkan pada masa itu. Jargon reformasi menjadi epik yang memoderasi segala pihak: dwifungs ABRI dicabut secara bertahap, memaksa presiden Soeharto mundur, dan seterusnya, yang melanggengkan keluarnya wasiat Soeharto kepada Habibie.

Ratusan ribu massa aksi rakyat dan mahasiswa di Jakarta menjadi terpisah dari permasalahan yang ada. Hasilnya adalah Pemilu 1999 yang “katanya” didukung oleh mahasiswa² dalam badan-badan pengawas PEMILU seperti Forum Rektor, UNFREL, dan KIPP. Sistem masih amburadul, pelaksana sistem pun patut mendapat kecurigaan hingga level tertinggi, rakyatnya ikonis, dan negara di ambang kehancuran. Penyelesaian tergesa-gesa terhadap krisis multidimensi ini melahirkan kondisi yang sekarang ada.

Abdurrahman Wahid alias GusDur menjadi presiden sementara partai pemenang PEMILU, PDI Perjuangan, hampir menjadi oposisi, seandainya Megawati tidak terpilih menjadi wakil presiden. *Garbage in Garbage out*, kata pepatah, dan inilah yang terjadi jika sistem yang bobrok dipakai.

GusDur menjadi presiden oleh kompromi di tingkat elite politik selama Sidang Umum MPR, dan kini gonjang-ganjing politik terjadi oleh pertikaian elite politik pula. Ada drama pertarungan antara lembaga kepresidenan (GusDur) dengan lembaga legislatif (Amien Rais dan Akbar Tandjung) yang jelas memiliki dampak luas sistem negara Indonesia.

Di tataran rakyat kebanyakan – yang tadi diistilahkan ikonis, terjadi konflik horizontal yang serius, antara pendukung GusDur dan yang anti terhadapnya. Di luar semua itu, sistem militer ternyata belum disentuh juga oleh reformasi, dan memiliki potensi pula untuk nantinya ambil bagian dalam gonjang-ganjing politik ini.

Ada yang bilang ini adalah kerusakan sistem ketatanegaraan. Ada pula yang mengatakan ini adalah akibat sudah sedemikian bobroknnya generasi tua yang tak bertanggung jawab. Berbagai analisis dan cerita disampaikan, ada yang optimis ada yang pesimis. Berbagai teori dikemukakan, namun suasana sudah sedemikian panas. Yang pasti jika kita dahulu beranggapan bahwa musuh kita adalah Soeharto, maka saat ini kita lambat-laun sadar bahwa musuh kita adalah diri kita sendiri, yang lahir dan dibesarkan di lingkungan yang dikondisikan oleh Soeharto.



² Mitologi yang berkembang saat itu adalah bahwa mahasiswa merupakan *agent of change* dan menjadi parameter sekaligus subyek perubahan sosial. Secara tak langsung, partisipasi mahasiswa dalam PEMILU ini menjadi pelegitimasi tak langsung keabsahan PEMILU ini.





Jejak Langkah IndOnEsla

*"Saya selalu bertanya kepada Tuhan, dalam pikiran dan doa-doa saya setiap hari.
Mengapa Tuhan menciptakan gunung-gunung batu dan salju yang indah itu
di daerah Amungme?
Freeport, ABRI, Pemerintah dan orang luar datang mengambilnya,
sementara kami menderita.
Ditekan, dibunuh tanpa alasan.
Sungguh, saya benar-benar marah pada Tuhan,
mengapa Dia menempatkan segala gunung indah dan barang tambang itu di sini."*

(Tuwarek, Narkime, Tetua Suku Amungme, 1994, *Merana Di Tengah Kelimpahan*, Els-Ham (1998).

1. Ironisme Negara Yang Kaya Raya

Tak salahlah kalau negeri ini dipuja-puja keindahan alamnya, karena aset kekayaannya memang luar biasa: tanah yang subur, kaya mineral, minyak bumi dan batu bara, hutan tropis, iklim yang stabil, dan relief alam yang indah. Rata-rata tiga hingga empat ribu turis manca negara¹ datang ke tanah air mengunjungi keindahan alam dan panorama Indonesia, sekitar 1.500.000.000 dolar AS per tahun diraup oleh PT Freeport Indonesia di Irian Jaya², sekitar 60 ton emas dikeluarkan dari dalam tanahnya per tahun³, dan seterusnya – Indonesia memang bagaikan zamrud khatulistiwa.

Ini pulalah yang merangsang bangsa-bangsa Eropah untuk menjajah Indonesia sekitar 5 abad yang lalu: berlomba-lomba mencari tanah di timur untuk mendapatkan rempah-rempah, namun yang didapati selain rempah-rempah adalah kekayaan tanah air yang lain yang semakin mendalamkan cinta kepada tanah air bernama Indonesia.

Konon, kolonialisme dan imperialisme adalah sebuah tantangan bagi bangsa Eropa untuk memberadabkan negara-negara di luar Eropah yang dikenal barbar dan tak beradab: namun apakah bangsa yang mendiami bumi Indonesia tidak beradab? Di bumi ini berdiri ribuan candi yang menyimpan cerita peradaban tertentu dari cerita-cerita yang tak hanya menceritakan adanya peradaban pada masa lampau, namun telah ada berbagai intrik kehidupan baik politik, teknologi, kesenian, dan sebagainya. Jika katanya bangsa Eropah hendak memberadabkan negara-negara di Hindia Belanda, mungkin kata yang paling tepat bukan

¹ Data dari Badan Pusat Statistik.

² Harian SUARA KARYA, Senin, 7 Mei 2001.

³ Data dari BAPPENAS 2001

“memberadabkan”, namun “meng-Eropah-kan” (!) – karena itulah yang memang mereka lakukan di bumi manusia kita.

Namun siapa akan menyangka bahwa negara sekaya ini ternyata punya hutang luar negeri sebesar 149,123 milyar dollar AS⁴ - di mana seorang anak yang baru lahir ke muka bumi Indonesia ini telah dipaksa berhutang sekitar 7 juta rupiah⁵ ke luar negeri, padahal popok pun ia belum lagi pakai (!).

Negara ini jatuh miskin oleh kerusakan dan krisis multidimensional yang meliputi sendi-sendi dasar kehidupan dan interaksi sosial: krisis kepercayaan, krisis moralitas, krisis moneter, dan seterusnya, oleh para penguasa yang juga ternyata adalah putra-putri bangsa ini. Anehnya, jika kita sebut negara ini miskin, ternyata tak semuanya miskin. Sebab berdasarkan catatan dan pengamatan yang dilakukan berbagai kalangan pengamat sosial, saat rupiah benar-benar terpuruk pun (1998), besar harga penjualan *handphone* tak turun, *demand* terhadap bensin untuk kendaraan bermotor tetap stabil, supermarket dan mal-mal masih tetap ramai dipadati pengunjung. Pemerataan pembangunan ekonomi ternyata tak tercapai. *Gap* sosial secara ekonomi sangat besar, dan ini rentan dengan konflik-konflik horizontal yang memang jadi pemandangan lain (baca: artifisial) dari negara ini. Konflik SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) terjadi hampir di semua tempat – walaupun tak terjadi potensi konfliknya sangat besar.

2. Dari Bawah Kelangkang Soekarno ke Soeharto

Namun percaya atau tidak, untuk Indonesia tidak ada logika yang menyatakan bahwa “kaya” berarti “benar-benar kaya”. Sudah disebutkan di atas bahwa Indonesia sebagai sebuah negara telah dihimpit hutang luar negeri dari sana dan dari sini. *Morgan Stanley Dean Writer* (MSDW) yang berkantor di London, Inggris, pada harian KOMPAS 27 Februari 2001, mengemukakan bahwa hutang luar negeri ini sudah dapat dikategorikan sebagai *permanent debt trap* (jebakan hutang permanen), yang hampir mustahil untuk dilunasi dalam beberapa generasi. Hutang luar negeri yang berjangka waktu lebih kecil dari setahun saja sudah mencapai 98% dari GDP Indonesia.

Tabel 2.1. Persentase Rakyat di Bawah Garis Kemiskinan

Ranking dunia	Negara	≤ 1 US \$ perhari	Di bawah standar miskin nasional
12	Meksiko	17,9 %	10,1 %
22	Filipina	18,7 %	37,5 %
29	Thailand	28,2 %	13,1 %
46	INDONESIA	26,3 %	15,1 %

Data dari: “Human Development Report 2000”, UNDP.

Kemanakah larinya kekayaan alam yang sedari tadi diutarakan? Apakah hal itu bohong-bohongan statistik belaka yang dibuat hanya untuk membesar-besarkan hati putra-putri yang terlanjur lahir di negara ini?

Mungkin MONAS, Gedung MPR/DPR yang sedemikian megah, gegap gempitanya acara GANEFO, menyimpan sebagian kecil dari jawaban dari Soekarno. Sementara itu, megahnya jalan layang di Jakarta, bunker di bawah pemukiman Cendana Jakarta, necisnya penampilan Hutomo Mandala Putra (putra Soeharto), tawa lebar Try Sutrisno, Benny Moerdani, dan seterusnya, menyimpan sebagian dari jawaban yang dapat diberikan Soeharto. Kehebatan pemukiman di pertambangan tempat PT FreePort Indonesia beroperasi, Caltex Indonesia, Exxon Mobil, dan seterusnya menjawab kondisi lemahnya sumber daya manusia kita

⁴ Data *The World Bank*, sebagaimana diberitakan Harian KOMPAS, 27 Februari 2001.

⁵ Dengan nilai kurs \$ 1 AS = Rp 9000,00.

untuk tidak tergiur oleh rayuan pulau kelapa dari berbagai perusahaan multinasional dengan berbagai jargon globalisasinya di mana-mana.

Sudah dimaklumi bahwa negara Indonesia berdiri dengan bentuk negara kesatuan, sementara persatuan dan kesatuan nasional pada masa itu masih sangat prematur dan bukannya bersifat ideologis, malah bersifat emosional senasib sebagai jajahan Jepang. Semua vektor perhatian publik Sabang hingga Merauke tertuju kepada kepemimpinan Soekarno dan M. Hatta, yang konon dianggap sebagai ratu adil bagi kemashlahatan Indonesia. Demikian pula sewaktu pemerintahan rezim Soekarno goyah oleh propaganda yang mengatakan kejahatan PKI sebagai dalang kericuhan negara (dan sekarang dipertanyakan lagi, sejauh mana keterlibatan militer (AD) terlibat kondisi sosial politik nasional waktu itu), Soeharto naik bagaikan malaikat pembela Indonesia hingga titik darah penghabisan. Perlu musuh bersama pada masa Soekarno: kolonialisme dan imperialisme. Pada masa Soeharto, musuh bersama adalah ideologi komunis yang makar terhadap kesatuan negara. Dan ini merupakan landasan normatif yang diturunkan dalam berbagai derivat, termasuk pendidikan moral, sejarah, dan pola hidup ketatanegaraan yang sangat katalistik terhadap tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serangkaian penyelewengan kekuasaan negara.

Dalam tabel 2 terlihat bagaimana pemerintahan Soeharto membodohi dan mengkebiri rakyatnya dengan lebih memperhatikan kondisi militernya daripada kondisi pendidikan dan kesehatan rakyatnya secara umum; lihat perbandingannya dengan negara-negara tetangga kita.

Tabel 2.2. Dana Publik untuk Pendidikan, Kesehatan, dan Militer (sebagai persentase dari GDP)

Negara	Pendidikan		Kesehatan		Militer	
	1990	1995-1997	1990	1996-1998	1990	1998
Malaysia	5,5	4,9	1,6	0,8	2,6	1,7
Thailand	3,3	4,8	1,0	1,7	2,2	2,1
Filipina	2,9	3,4	1,5	1,7	1,4	1,4
Indonesia	1,0	1,4	0,6	0,6	1,6	1,0

Sumber: *Human Development Report 2000, UNDP.*

Demi stabilitas nasional ia telah lebih mengutamakan pembangunan militer daripada pendidikan dan kesehatan nasional. Rakyat dibiarkan terbius oleh pola-pola developmentalisme yang berkembang dengan berbagai pembangunan fisik yang ia lakukan, yang itupun hanya di bagian Barat Indonesia dan hanya meliputi kota-kota besar saja. Urbanisasi menjadi semacam fatamorgana di tengah penat dan sulitnya kehidupan desa dibandingkan dengan kesilauan gaya hidup kosmopolit daerah kota. Sebagai contoh orang berlomba-lomba ke Jakarta sementara prasarana hidup di Jakarta tidak memadai kuantitasnya, akibatnya tingkat pengangguran dan kriminalitas pun menjadi tinggi.

Sebagaimana diutarakan tabel 2 di atas, pada dasarnya baik pendidikan, kesehatan, militer, atau sektor apa pun secara nasional masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun dari segi pemasukan nasional (GNP), pada dasarnya kita banyak dibantu oleh pinjaman luar negeri – namun seperti diuraikan sebelumnya, pola budaya kekuasaan yang terjadi di negara kita pasca kemerdekaan (atau lebih tepatnya pasca Soekarno) bukanlah pola feodalisme biasa, namun pola feodalisme bertingkat: multilevel otoritarianisme. Yang melakukan korupsi bukan hanya kepala negara, namun hampir seluruh jajaran pemerintahan di berbagai sektor dan eselon kepegawaian.

Sama seperti halnya menyebut bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya, yang dipertanyakan bukanlah apakah kekayaan Indonesia itu cukup untuk membiayai Indonesia, namun sumberdaya manusia pengelola kekayaan itu bersih dari penyelewengan atau tidak. Lebih jauh lagi, kekayaan alam itu sendiri dieksplorasi dan dieksploitasi bukan pula oleh bangsa sendiri: kita "menyewa" tenaga ahli dari berbagai perusahaan multinasional untuk mengeruk isi perut

Indonesia ini, namun kita tak pernah punya kemampuan *auditing* karena keterbatasan sumberdaya manusia kita. Keributan masalah tambang emas di Busang beberapa waktu yang lalu mungkin salah satu contoh konkritnya.

3. Masyarakat Ikonis kita

Tak ada yang menyangkal bahwa selama 32 tahun belakangan, Soeharto telah mengajarkan banyak hal kepada bangsa Indonesia, melalui media komunikasi yang ia kuasai, melalui kurikulum pendidikan formal yang ia susun, bahkan melalui kekerasan militer untuk “murid-murid” yang dianggapnya pembangkang. Demokrasi diartikan lain dengan pelarangan secara eksplisit terhadap oposisi pemerintahan. Partai-partai direduksi menjadi tiga partai yang sudah dianggap mewakili seluruh rakyat, sementara partai ini pun harus mengikuti sejumlah matrikulasi yang ia siapkan, bila tidak kasus 27 Juli 1996 terjadi. Sejumlah buku dilarang beredar dengan cap-cap ideologi kiri dan ateisme, semua berasal dari pengalaman traumatik pemberontakan G 30 S/PKI. Rakyat dilarang berkumpul dan berserikat, bahkan dewan mahasiswa yang akhirnya dengan berani menolak Soeharto harus menerima pembubaran (1978) dan pendudukan militer.

Namun sekarang Indonesia telah dipimpin orang yang bukan Soeharto. Sekarang Indonesia dipimpin oleh seorang kiai yang terkenal dan sejak zaman Soeharto telah menjadi *public figure*. Parlemen yang ada sekarang pun sepertinya lebih galak kepada eksekutif dan berani. Namun apakah kondisi lebih baik?

Sewaktu Soeharto jatuh, kita hanya menjatuhkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Sistem pemerintahan tidak diubah sama sekali, dan orang masih ragu-ragu dengan istilah multilevel otoritarian. Sistem antara kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif menjadikan negara sekarang dalam absurditas yang setinggi-tingginya. Tiap kelembagaan negara seolah tidak mengetahui hingga batas mana ia boleh “bermain”. Akibatnya ada skenario perang-perangan antara presiden dengan parlemen. Namun tak berhenti hingga di sana, masyarakat sebagai “alumni” Ode Baru termakan pola ikonisasi ini. Ada konflik-konflik lain di bawah antara pro dan anti presiden, dan bukan tak berpotensi untuk akhirnya berdarah juga.

Semua serba ikonis⁶. Pancasila dipandang sebagai *output* pemikiran Orde Baru dan perlu digugat keberadaannya, sehingga beberapa orang mulai mengungkit-ungkit cerita Piagam Jakarta. Sewaktu GusDur mengusulkan pencabutan Tap MPRS XXV tentang komunisme, reaksi masyarakat sangat negatif yang tentu saja diikuti oleh para tetua daerah dan agama. Ada sebuah komunis fobia yang aneh berkembang. Seolah komunisme itu berbicara soal bagaimana menghapuskan agama di dunia ini. Seolah bahwa agama adalah satu-satunya solusi yang menjanjikan, padahal agama yang sekadar penghayatan ikonis alias agama KTP, justru menjadi kedok yang menggergoti sistem pemerintahan yang saat ini sedang ambruk. Sebagai contoh, barisan anti GusDur membawa panji-panji agama sementara barisan pro GusDur juga membawa panji agama yang sama. Jelas kita di sini bukan mengikuti agama tersebut, namun mengikuti pemimpin agama tersebut, dan inilah yang disebut pola pikir ikonis itu.

Agama menjadi simbol kemashlahatan umat, namun hanya beberapa gelintir yang paham akan agama itu sendiri. Begitu gampang konflik horizontal bernuansa SARA terjadi di negara kita. Agama pada akhirnya hanya berperan sebagai media pembangunan solidaritas semu seperti halnya sentimen terhadap suku, ras, dan golongan.

4. Masyarakat Ikonis oleh ketimpangan ekonomi pembangunan

Indonesia merupakan sebuah negara yang baru lahir tahun 1945, sementara itu di luar negeri, khususnya di kawasan Eropah dan sekitarnya, peradaban

⁶ Mungkin istilah yang digunakan Tan Malaka (dalam bukunya MADILOG, materialisme, dialektika, dan logika) yakni dialektika idealistis sama dengan pola pikir ikonis yang dimaksud.

masyarakat telah berkembang dengan berbagai intrik politisnya telah memaksakan negara-negara dunia ketiga untuk ikut dalam sumbangsuhnya sebagai warga dunia untuk peradaban dunia. Peter F. Drucker berusaha melinearasi perkembangan (baca: evolusi) peradaban Barat⁷. Mulai dari tahapan masyarakat yang mengutamakan negara bangsa untuk kesejahteraan bersama oleh hiruk pikuk perang dan konflik antar ras sehingga pemimpin seperti Otto von Bismarck mendirikan *welfare state*, sebagai tahapan awal evolusi kebangsaan. Dari sana, ternyata banyak *welfare state* yang hidup berdampingan dengan batas-batas geopolitis tertentu, ditambah lagi dengan letusan peradaban dalam revolusi industri, sehingga semangat bernegara berubah, dari sekadar untuk kesejahteraan menjadi nasionalisme (klasik), lahirlah *nation state*. Dari sana, ternyata sistem kapitalisme secara tak langsung menjadi pimpina dunia sehingga batas-batas geopolitis berubah menjadi batas-batas moneter dan modal, sehingga lahirlah bentuk semangat kebangsaan yang baru: *fiscal state*. Dari sini, arus informasi dan tuntutan globalisasi serta kemajuan teknologi telekomunikasi yang sedemikian pesat hampir tak ada lagi yang disebut sebagai batas geopolitis bahkan oleh batasan fiskal sekalipun. Kaum futuris '60-an mungkin mengistilahkannya dengan ungkapan: "dunia sebagai kampung global", lahirlah *mega-state*.

Namun ini semua terjadi di daratan Eropah, bagaimana dengan negara seperti Indonesia, yang baru saja merdeka dan semangat nasionalisme bangsa sedang dalam titik kulminasi maksimumnya? Mantan PM Singapura, Lee Kuan Yew pernah mengungkapkan, "Kita adalah masyarakat pertanian yang telah ter-industrialisasi selama dua atau tiga generasi. Apa yang terjadi di Barat lebih dari 200 tahun lebih di sini terjadi hanya dalam waktu kurang dari 50 tahun. Ini menjejalkan (peradaban) dalam waktu yang sangat singkat, yang terkait dengan begitu banyak kesalahan dan kerusakan..."⁸

Kompresi peradaban ini melahirkan begitu banyak kesalahan fungsi dan kerusakan dalam strata masyarakat kita. Kesalahan fungsi inilah yang melahirkan begitu tingginya tingkat kriminalitas di negara-negara dunia ketiga. Kita lupa bahwa tiap kali pembangunan fisik kita lakukan untuk memperbaiki infrastruktur masyarakat, kita seharusnya membangun pola kebangsaan baru yang meliputi pembangunan suprastruktur masyarakat dalam menerima kemajuan peradaban yang ada.

Tabel 2.3. Tingkat kriminal di Indonesia

	1991	1994	1997
✓ TINGKAT KRIMINALITAS			
Per 100000 penduduk	713	931	1112
✓ TAMBAHAN TAHANAN			
% anak-anak	7,66	8,25	6,78
% remaja	24,55	23,12	22,02
% dewasa	67,79	69,63	71,19

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 2.4. Jumlah pekerja anak-anak beberapa kota dan negara tahun 1990-an

Filipina	766.000
Jakarta, Indonesia	700.000
Dhaka, Bangladesh	300.000
Lima, Peru	100.000

Sumber: Human Development Report 2000, UNDP

⁷ *The Post-Capitalist Society*, Peter F. Drucker, HarperBusiness, New York, 1993.

⁸ *Foreign Affairs*, ed. March-April, 1994.

Developmentalisme yang dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru (menyatakan dirinya sebagai orde pembangunan) ternyata hanya menghasilkan nasionalisme untuk pragmatisme ekonomi, yang mengakibatkan adanya ketimpangan antar kelas sosial yang sangat jauh. Oleh Soeharto dan kronikroninya ini disebut dengan nama politik ekonomi *trickle down effect*, di mana ia “menyuburkan” perekonomian segelintir pihak dahulu baru kemudian nantinya diharapkan ini akan “turun” ke tingkat ekonomi di bawahnya dan seterusnya hingga seluruh rakyat sejahtera secara ekonomi. Itulah sebabnya mengapa Soeharto dekat dengan “pemimpin” ekonomi Indonesia yang nota bene kebanyakan keturunan Cina⁹. Ini jelas menimbulkan kecemburuan sosial yang tinggi, sehingga pertokoan Cina-lah yang menjadi sasaran penjarahan saat terjadi banyak kerusuhan sosial sekitar 1998-1999 yang lalu.

4. Masyarakat Ikonis kita dan kehidupan beragama

Seharusnya, kehidupan beragama memberikan angin segar terhadap tingkat kriminalitas yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Ini juga yang mungkin terlintas di kepala Soeharto selain mempertinggi kewenangan militer dalam rangka dwifungsi ABRI-nya. Pancasila dikeramatkan sebagaimana rakyat dipaksa meng-keramatkan keluarga Cendana.

Sejarah nasional kita menunjukkan bahwa kebangkitan ke-beragama-an nasional tumbuh dari suatu ketimpangan sosial. Mungkin kita masih ingat cerita H.O.S.Cokroaminoto yang mengintegrasikan kekuatan nasional melawan penjajah dengan reorientasi Sarekat Dagang Islam (SDI) menjadi Sarekat Islam (SI). Di saat kondisi menyatakan sulitnya membangun perlawanan nasional bersama berlandaskan nasionalisme (oleh pluralitas kesukuan Indonesia) ternyata gagal, maka integrasi yang paling baik adalah integrasi dengan kesamaan agama¹⁰.

Tabel 5 mungkin dapat memberikan gambaran pesatnya perkembangan keber-agama-an nasional kita (Islam) oleh pesatnya pembangunan di bidang pendidikan pesantren – mengingat pondok pesantren merupakan salah satu pusat pengembangan agama Islam terpenting.

Tabel 2.5. Pembangunan Pesantren Nasional (satuan: pondok)

Pembangunan	Akhir Pelita II	Akhir Pelita III	Akhir Pelita IV	Akhir Pelita V
Pengadaan buku pelajaran dan perpustakaan	1.744	1.633	1.264	51.327
Pembangunan bengkel kerja dan rehabilitasi gedung	123	742	188	387

Sumber: Badan Perencanaan Nasional

Di samping itu, secara budaya, keber-agama-an juga menjadi hal yang esensial. Sebagaimana dikatakan Dewi Anwar, “Dulunya, Islam seringkali diidentikkan dengan keterbelakangan dan kemiskinan, di mana orang Muslim modern seringkali malu akan identitas keislaman mereka. Namun sekarang ini, Islam tidak lagi menjadi agama bagi pecundang. Kesadaran berbusana muslimah telah menaikkan pasar pakaian Islam, atau meningkat pesatnya jumlah taman kanak-kanak muslim. Bahkan musik populer yang dipengaruhi nuansa Arab:

⁹ **Buku Putih Perjuangan Mahasiswa ITB**, DM ITB, Bandung, 1978

¹⁰ Bunga Rampai: “Pancasila, Agama, dan Demokrasi”, editor M. Azis, dkk., Penerbit Gramedia, 1995.

dangdut, menjadi populer dan menjanjikan pasar yang sangat menguntungkan bagi industri musik Indonesia"¹¹.

Suatu hal yang menarik dari sistem sosial kenegaraan Indonesia adalah batas antara "gereja" dan "negara" seperti yang terjadi dalam perkembangan sejarah Eropa tidak terjadi di sini. Ada suatu nuansa integral antara nasionalisme yang berkembang dan pola hidup religius masyarakat¹². Di sisi lain, para ulama dan pemimpin agama menjadi pemimpin masyarakat yang sangat mengakar di tingkat *grass root*. Intelektual Islam menjadi sebuah kekuatan yang besar, dan barangkali inilah juga yang melatarbelakangi pemerintah Orde Baru mendirikan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim).

Namun harus diakui, bahwa integralitas "keber-negara-an" dengan "keber-agama-an" menemui titik rancunya saat kehidupan masyarakat menjadi sedemikian dogmatis dalam hal hubungan umat beragama dengan pemimpin agamanya. Jelas sekali ini terlihat dalam aksi-aksi dalam kurun waktu Januari 2001 yang lalu, di mana ada massa yang membawa panji-panji Muhammadiyah menuntut GusDur turun bersama massa BEM (badan eksekutif mahasiswa), di sisi lain ada pula panji-panji barisan pemuda dan ormas Nahdlatul Ulama (NU) yang menyatakan dukungannya terhadap GusDur. Pemimpin agama sangat sentral posisinya dalam kehidupan bermasyarakat. Ini menunjukkan secara materil bahwa ternyata kehidupan feodalisme kita belum hilang, dan justru, saat fisik kita mengalami eropanisasi, ternyata kita masih "diajari" untuk tetap memegang feodalisme demi kepentingan dan kelanggengan penguasa.

Tragedi sosial Ambon-Halmahera bisa jadi sebuah cerita dengan landasan teori di atas. Sentimen agama yang tumbuh dan kenafian para pemimpin agama menyebabkan cerita untuk melawan rezim yang membodohi berubah menjadi sebuah perang suci untuk membela agama. Ratusan bahkan ribuan orang tewas dalam konflik horizontal oleh sistem pemerintahan yang membiarkan rakyat terus terbodohi dalam ikonisasi agama yang lebih kepada kultus terhadap tokoh agama. Masalah yang satu bermetamorfosis menjadi masalah yang lain, dan tetap saja tak ada yang mampu memberikan solusi yang benar-benar efektif karena memang masalah ada pada pisau analisisnya: kita membutuhkan revolusi budaya, transformasi pola kehidupan feodal dan dogmatis ke pola kehidupan yang plural yang lebih dialektis memandang masalah.

5. Oleh-oleh Sampit: Ikonisasi klasik kesukuan berbuntut religi

Ratusan nyawa melayang dalam tragedi Sampit. Ini tentunya menunjukkan bahwa ternyata sebagai bangsa, Indonesia terlalu prematur menjadi bangsa yang besar. Indonesia hampir tak pernah mengalami fasa kulminasi atas nasionalisme. Nasionalisme kita masih terbalut dalam nuansa komunalisme dalam bentuk sektarianisme, primordialisme, feodalisme, tanpa sebuah keutuhan nasional kebangsaan.

Bahkan pemerintahan RI yang sekarang pun jarang berniat menghilangkan secara total feodalisme tersebut. Penyelesaian-penyelesaian masalah-masalah nasional seringkali hanya jadi perdebatan di meja elite politik. Sementara elite politik yang ada sudah hampir tak bisa lagi dipercaya menyuarakan aspirasi yang direpresentasikannya.

Masri Sareb Putra, etnolog Dayak, mengatakan bahwa konflik kesukuan yang terjadi di Sampit sebagai sebuah akumulasi konflik yang selama ini diredam oleh pemerintahan Orde Baru¹³. Tommy Soeharto, contohnya, memonopoli penjualan



¹¹ "Political change in SouthEast Asia", M.J. Vatikiotis, Routledge, New York, 1996.

¹² - ibid -

¹³ Harian "The Jakarta Post", 7 Mei 2001.

jeruk Pontianak, dan perusahaan milik Soeharto yang mengendalikan tambang emas di Monterado dan Budok.

Lagi-lagi kita dihadapkan pada kondisi pembodohan massal, di mana masyarakat yang tak tersadarkan dan lebih suka dengan kemudahan dialektika idealistik mengubah cerita melawan rezim otoriter menjadi konflik horizontal yang menyengsarakan rakyat sendiri dan melanggengkan penguasa.

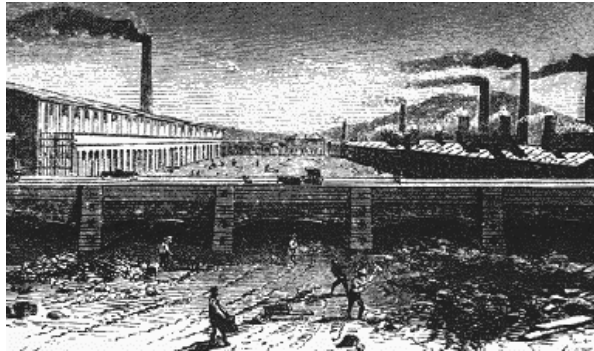
Apakah permasalahannya pada provokator? Yang pasti, provokator takkan mudah bekerja, jika masyarakatnya tersadarkan dan bukannya ikonis.

6. Epilog

Bagaimanapun yang terjadi adalah ikonisasi yang merajalela di mana-mana. Kelas-kelas sosial di negara ini saling jegal, mulai dari kelas ekonomi antara si kaya dan si miskin, komposisi agama-agama, struktur suku-suku, dan berbagai golongan-golongan. Semuanya takluk kepada bendera yang ia bawa, sehingga yang terjadi bukanlah penyelesaian masalah, melainkan masyarakat yang semakin sakit: saling tuding, saling bunuh; tak ada lagi yang bisa dipercaya.

Warna Indonesia saat ini adalah warna konflik horizontal. Pemerintah tak tersentuh, begitu pula dengan parlemen yang bermain atas kepentingan partai, sementara rakyat tak boleh menyesal memilih telah partai pada waktu PEMILU yang lalu. Lebih baik rasanya menyesal kenapa begitu gampang terbodohi oleh situasi yang jelas-jelas mengaburkan permasalahan sebenarnya.





Krisis demi Krisis

*“...kewajiban dari intelektual adalah untuk mencela ketidakadilan,
di manapun ia berada...”*
Jean Paul Sartre, 1974¹

1. Tak Pernahkah Aku Merdeka?

Kolonialisme tidak berakhir saat Soekarno-Hatta (yang disambut riang gembira oleh seluruh rakyat) memproklamkan kemerdekaan. Ia hanya bertransformasi menjadi sebuah cerita lain penjajahan. Tak ada yang menyangkal bahwa pemerintahan Orde Lama telah menyangkal cita-cita kemerdekaan yang ingin menjadikan rakyat lebih sejahtera daripada saat penjajahan Belanda atau Jepang.

Demokrasi Pancasila, berubah ke demokrasi liberal, terus berubah menjadi demokrasi terpimpin, sebelum akhirnya Soekarno digasak oleh momentum G30S/PKI yang menaikkan nama Soeharto ke permukaan. Soeharto menjadi penyelamat negara dan layak sebagai presiden.

Kepresidenan Soekarno mungkin lebih layak dianalogikan sebagai sebuah monarki absolut di mana sistem sedemikian runyamnya sehingga semua kebijakan negara adalah apa yang diinginkan olehnya. Dan pengangkatan sumpahnya sebagai presiden seumur hidup jelas oleh MPRS merupakan puncak penjajahan struktural yang dilancarkannya. Namun demikian, rakyat secara umum memang tidak terlalu memperhatikan hal itu, mengingat gonjang-ganjing politik luar negeri bekas penjajah Belanda dan gugatan militeristiknya terhadap deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Soeharto tak ayal menjadi penghisap bangsa yang paling “sukses”. Selama 32 tahun ia menjadi pimpinan dan tak satupun legal formal yang menuntutnya karena segala sesuatu memang telah diskenariokan olehnya. Soeharto tak tersentuh oleh hukum, padahal sudah bukan rahasia lagi korupsi yang ia lakukan bagi negara *plus* pemerintahan bergaya militeristiknya yang memakan ribuan korban jiwa. Soekarno dan Soeharto sebagai pemimpin bangsa di tengah superstruktur tata negara yang bobrok jelas tak berusaha merubah pola pikir

¹ Dari essay oleh Douglas Kellner, “*Techno-Politics, New Technologies, and the new public spheres*”, UCLA, Los Angeles, 1998 (dimuat di Illuminations – www.uta.edu/huma/illuminations/kellner/).

feodal yang berkembang (baca: *mass deception*), malah memanfaatkan kondisi yang ada untuk mengukuhkan keberadaan diri dan posisinya.

2. Kita dipaksa berteknologi Maju, Didorong Mundur

Sesaat pembangunan yang dijalankan pemerintahan Orde Baru memberikan kesilauan kita akan teknologi maju. Namun regulasi akan perkembangan informasi yang dijanjikan oleh perkembangan teknologi ini (dalam hal ini telekomunikasi) ternyata sangat terbatas. Sensor dan pembreideilan bagi media massa yang dinilai telah melawan kebijakan pemerintahan, benar-benar merupakan komunisme praktis yang ditanamkan pemerintahan Soeharto. Informasi diganjal dan berbagai isi siaran telekomunikasi yang diberikan kepada rakyat benar-benar menjadikan rakyat tertipu dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Ketidakpuasan terhadap penguasa ditekan habis-habisan oleh pemerintahan yang militeristik, menyebabkan adanya semacam keputusan kolektif rakyat terhadap tiap kelembagaan negara, termasuk kepada berbagai lembaga swadaya masyarakat (*non governmental organization*). Inilah yang menyebabkan adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada lembaga kemahasiswaan untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.

Kondisi yang ada pada masa Soeharto benar-benar menunjukkan bahwa di negara kita informasi akan pemerintahan benar-benar tak bisa diakses secara lancar oleh masyarakat luas. Kalaupun informasi bisa diakses berbagai regulasi akan menghempang setiap upaya kreatif untuk mengembangkan informasi yang ada itu.

Developmentalisme kita disertai dengan upaya yang membiarkan feodalisme berkembang luas ditambah berbagai praktik ikonisasi masyarakat memandang dunia. Yang terjadi adalah paranoia kolektif terhadap berbagai ikon-ikon yang sebetulnya tidak benar-benar diketahui dan dipahaminya. Bangsa kita menjadi bangsa yang tidak kreatif.

Tabel 3.1. Penanaman modal Jepang di Indonesia

Tahun	Total dalam juta \$ AS	Persentase perubahan
1986	250	-38,7
1987	545	118,0
1988	586	7,5
1989	631	7,7
1990	1.105	75,1
1991	1.193	8,0
1992	1.676	40,5
1993	813	-51,5
1994	1.759	116,4

Sumber: "Kaum Profesional Menentang Rezim Otoriter", A. Prasetyantoko, Grasindo, 1999

Investasi modal asing ke dalam negeri sangat tinggi, namun tidak dibarengi dengan upaya pencerdasan rakyat sehingga memiliki kompetensi sumber daya alam yang kaya itu². Pembangunan yang terjadi menjadi tidak merata secara teritorial, ditambah faktor sistem pemerintahan yang korup, membengkokkan

² Pemberian dana bantuan kepada negara-negara dunia ketiga pada dasarnya melihat keberhasilan proyek ini kepada Jerman (pasca PD II) dalam bentuk Marshall Plan. Keprihatinan negara-negara maju kepada negara berkembang melahirkan konon melatarbelakangi dibentuknya badan ekonomi internasional seperti World Trade Organization (WTO) dan International Monetary Fund (IMF). Namun kondisi sosial Jerman pasca PD II tentu berbeda dengan kondisi sosial negara berkembang (seperti Indonesia), akibatnya perlu ada pengkondisian agar Indonesia siap menerima bantuan. Inilah yang mungkin melatarbelakangi dijalankannya praktik-praktik mengintervensi urusan internal negara oleh lembaga-lembaga transnasional tadi.

hutang negara ditambah dengan tingginya tingkat kriminalitas dan *social gap* di tingkatan *grass root*. Inilah yang menyebabkan seringkali dikatakan bahwa kapitalisme kita merupakan kapitalisme semu, oleh karena kapitalisme kita sangat bergantung kepada kekuatan modal asing dan peranan negara yang korup, serta tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap teknologi asing³. Sementara landasan kapitalisme Barat merupakan kebebasan (liberalisasi) individu setinggi-tingginya – dan ini tak pernah kita temui di Indonesia pada masa Orde Baru.

3. Informasi: barang mahal selama ORBA

Developmentalisme yang dijalankan Orde Baru ternyata tidak begitu menyentuh rakyat. Hutang luar negeri dalam berbagai bentuk, seperti pinjaman uang, investasi, dan sebagainya hanya menjadi tempat bagi kroni Soeharto untuk lebih memperkaya dirinya. Pembangunan fisik akhirnya jalan juga meskipun dana pinjaman tersebut telah dipotong di sana-sini oleh sistem pemerintahan yang multilevel korup: pembangunan yang dijalankan tidak optimum dan tidak mengena kepada kebutuhan masyarakat. Di sinilah letak kecurigaan tingginya kecemburuan sosial yang ber-ekses kepada tingginya tingkat kriminalitas di Indonesia.

Demikian pula dengan informasi. Masyarakat Indonesia, jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, ternyata juga masih rendah kemampuan literernya: 14,3% orang Indonesia (tahun 1998) ternyata masih buta huruf. Tabel di bawah mungkin dapat memberikan sedikit gambaran.

Tabel 2.2. Kemampuan baca-tulis orang dewasa (%) yang berusia di atas 15 tahun (1998)

Thailand	95,0
Filipina	94,8
Vietnam	92,9
Singapura	91,8
Brunei Darussalam	90,7
Malaysia	92,9
Indonesia	85,7

Data dari: "Human Development Report 2000", UNDP.

Di antara negara-negara ASEAN ternyata dari segi baca tulis, kita negara yang paling terbelakang. Di sisi lain, akses yang dimiliki oleh rakyat terhadap media informasi yang ada juga ternyata sangat rendah. Hal ini kita lihat melalui tabel berikut:

Tabel 3.3. Akses masyarakat Asia Tenggara terhadap telekomunikasi

Negara	Akses Siaran Televisi /1000 penduduk		Ketersediaan komputer (PC) /1000 penduduk		Akses Internet /1000 Penduduk (1998)
	1990	1996-1998	1990	1996-1998	
Indonesia	61	136	1	8	0,07
Malaysia	149	166	8	59	2,16
Thailand	108	236	4	22	0,34
Filipina	49	108	3	15	0,13
Singapura	379	348	74	458	21,2
Brunei Darusalam	241	638	-	-	3,79

Data dari: "Human Development Report 2000", UNDP.

Ini semua merupakan hasil pembangunan yang dijalankan oleh rezim Orde Baru. Wajarlah sehingga begitu mudah untuk memanipulasi informasi di negeri ini. Para pemimpin masyarakat sudah langsung dianggap tahu segalanya dan

³ "Kapitalisme Semu Asia Tenggara", Yoshihara Kunio, LP3ES, Jakarta, 1990.

menjadi pemegang kunci kebenaran. Kita saksikan sendiri bagaimana isu-isu gampang beredar dan menjadi pemicu konflik di seantero negeri. Potensi konflik tak pernah dihilangkan melalui bentuk-bentuk penyadaran dan “pencerahan” masyarakat, hanya diredam dengan memberikan fenomena penokohan masyarakat⁴ (baca: masyarakat ikonis).

Dengan lain perkataan bahwa pada dasarnya telah merusak proses dialektika bangsa selama lebih dari 32 tahun, sehingga rakyat secara umum lebih berfikir tentang perut daripada hal-hal lain yang menindasnya.

4. Takut melihat Masa Depan

Dengan beraninya, Soeharto telah menandatangani berbagai perjanjian untuk mendukung kapitalisme global dalam praktik-praktik bertahap teritorial menuju pasar bebas. Diawali dengan kesepakatan dalam *Marrakesh Accord* pada April 1994 yang melahirkan organisasi perdagangan dunia: *World Trade Organization* (WTO), maka kita sudah harus – siap atau tidak siap – masuk menuju pasar global tersebut. AFTA (*Asean Free Trade Area*), APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*), NAFTA (*North America Free Trade Area*), disertai dengan berbagai format kerja dalam skala yang lebih kecil telah menanti-nanti kita dengan kebodohan yang kita miliki.

Hingga sekarang kita belum dapat seratus persen menguasai sumber daya alam kita, di sisi lain kita masih bingung masalah pengangguran dan angka tenaga kerja yang meninggi sementara kreativitas untuk mencipta lapangan kerja sangat rendah – dan di sisi yang lain lagi, sistem pemerintahan kita korup dan tak pernah bahkan secara asimtotis (mendekati) *clean governance* (pemerintahan yang bersih).

Pola pembangunan developmentalistik telah menyilaukan kita dengan pembangunan yang jauh dari apa yang seharusnya kita butuhkan, sehingga di saat kita seharusnya – sebagai bangsa yang baru lahir – belajar tentang tegaknya hukum (*rule of law*), demokratisasi, penyadaran dan pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya, kita malah “dipaksa” untuk berkecimpung dengan teknologi – seolah kita mampu menciptakan level bermain yang sama dengan negara maju sementara kondisi sosiologis kita sangat memprihatinkan seperti sekarang ini. Dan dengan menggeluti dan mengikuti arus pemikiran ini, kita hanya akan tetap menjadi pangsa pasar yang baik bagi si negara maju yang tak mungkin kita kejar⁵. Kita akan selalu menjadi pembuntut yang baik bagi perkembangan teknologi dan peradaban dunia. Inilah yang membuat berbagai negara maju begitu getol untuk memenangkan isu globalisasi ini di seluruh pelosok dunia: pasarnya di negara sendiri semakin berkurang oleh tingginya jumlah penawaran (*supply*) sementara permintaan (*demand*) tak berubah.

Bangsa kita juga terkenal dengan budaya konsumeristisnya, tak cinta dengan produk dalam negeri, jelas akan menjerumuskan kita ke penjajahan budaya, sebuah penjajahan lanjutan dari penjajahan struktural rezim Orde Baru. Masuklah berbagai merk dagang perusahaan transnasional dan mereka menentukan apa yang kita sukai, inginkan, dan beli⁶, dan bukan tak mungkin kita bakal jadi kuli di negeri sendiri, seperti ungkapan pengamat ekonomi Sri-Edi Swasono⁷. Semua ini masuk ke seluruh aspek kehidupan bahkan masa depan bangsa karena ia menyerang budaya bangsa⁸ termasuk di tempat budaya itu dikaji, diolah, dan

⁴ Baca lebih lanjut: essay R. William Liddle, “*Indonesia’s Unexpected Failure of Leadership*”, dalam buku: “*The Politics of Post-Suharto Indonesia*”, Council on Foreign Relations Press, New York, 1999.

⁵ Altbach, Phillip G., “*Higher Education in The Third World*”, Maruzen Asia, Singapore, 1982.

⁶ “*Market Democracy in a Neoliberal Order: Doctrines and Reality*”, Noam Chomsky, Davie Lecture, University of Cape Town, May 1997 (dimuat di *Z-Magazine* - www.zmag.org/chomsky/).

⁷ Harian “*The Jakarta Post*”, 6 Mei 2001.

⁸ Jelas bukan akulturasi karena dominasi dan trend budaya barat (industri maju) yang jelas menjadi hagemoni di negara-negara konsumtif seperti Indonesia. Untuk lebih jauh pembahasan antropologis hal

dibentuk: sekolah dan kampus-kampus⁹. Pemberlakuan otonomi daerah (melalui pelaksanaan naif dan tergesa-gesa UU no. 22/1999 dan UU 25/1999) jelas menimbulkan potensi munculnya raja-raja kecil (baca: Soeharto-soeharto kecil) di berbagai tempat di daerah oleh karena sifat multilevel otoritarianisme dan masyarakat yang sangat ikonis. Saat kita masih sangat tidak kreatif dalam memandang dunia oleh karena selalu menunggu solusi dari yang kita tua-kan dengan pemahaman feodalistis kita terhadap sistem sosial, di lain pihak arus modal berdatangan ke daerah, sementara mereka yang kita tua-kan pun tak luput dari praktik korupsi, maka bagi kita masa depan mungkin akan menjadi menakutkan.

5. Krisis Multidimensional: Aku tak pernah Merdeka!

Jelaslah sudah, perjalanan sejarah atau proyeksi masa depan kita dengan kondisi yang ada sekarang terlihat selalu menjerumuskan kita pada sebuah pemiskinan dialektika alias penjajahan. Yang berubah hanyalah subyek penjajahnya.

a. Penjajahan Fisik (Kolonial) selama ...-1945

Katakanlah bahwa pada 17 Agustus 1945 kita memang telah merdeka dengan peng-amin-an seluruh rakyat terhadap deklarasi oleh Soekarno. Artinya di sini penjajahan terhadap bangsa dilakukan oleh pemerintah kolonial secara fisik melakukan eksploitasi terhadap sumber daya nasional.

b. Penjajahan Struktural (1945-...)

Secara struktural kita terjajah oleh pembodohan struktural yang melahirkan ikonisasi dalam tubuh masyarakat (*gesselschaft*) yang mengakibatkan masyarakat sangat mudah terpancing dalam konflik horizontal berbau SARA yang mendistorsi masalah sebenarnya dalam tubuh masyarakat itu. Lebih jauh aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan fobia-fobia yang akhirnya timbul terhadap berbagai hal yang belum pernah dikaji dan dimengerti sebelumnya, ditambah pola developmentalisme selama Orde baru yang merentankan kecemburuan sosial (*social envy*), multilevel otoritarianitas (sub-kultur korupsi, kolusi, dan nepotisme bertingkat), dan militerisme yang mengkristal dan tersedimentasi menjadi potensi besar yang tak mudah dihapus karena mengandung kemungkinan timbulnya mafia militer. Konflik elite diterjemahkan sebagai konflik horizontal yang semakin membelenggu masyarakat dalam simplifikasi-simplifikasi (penyederhanaan) masalah yang naif dan menghancurkan eksistensi masyarakat itu sendiri.

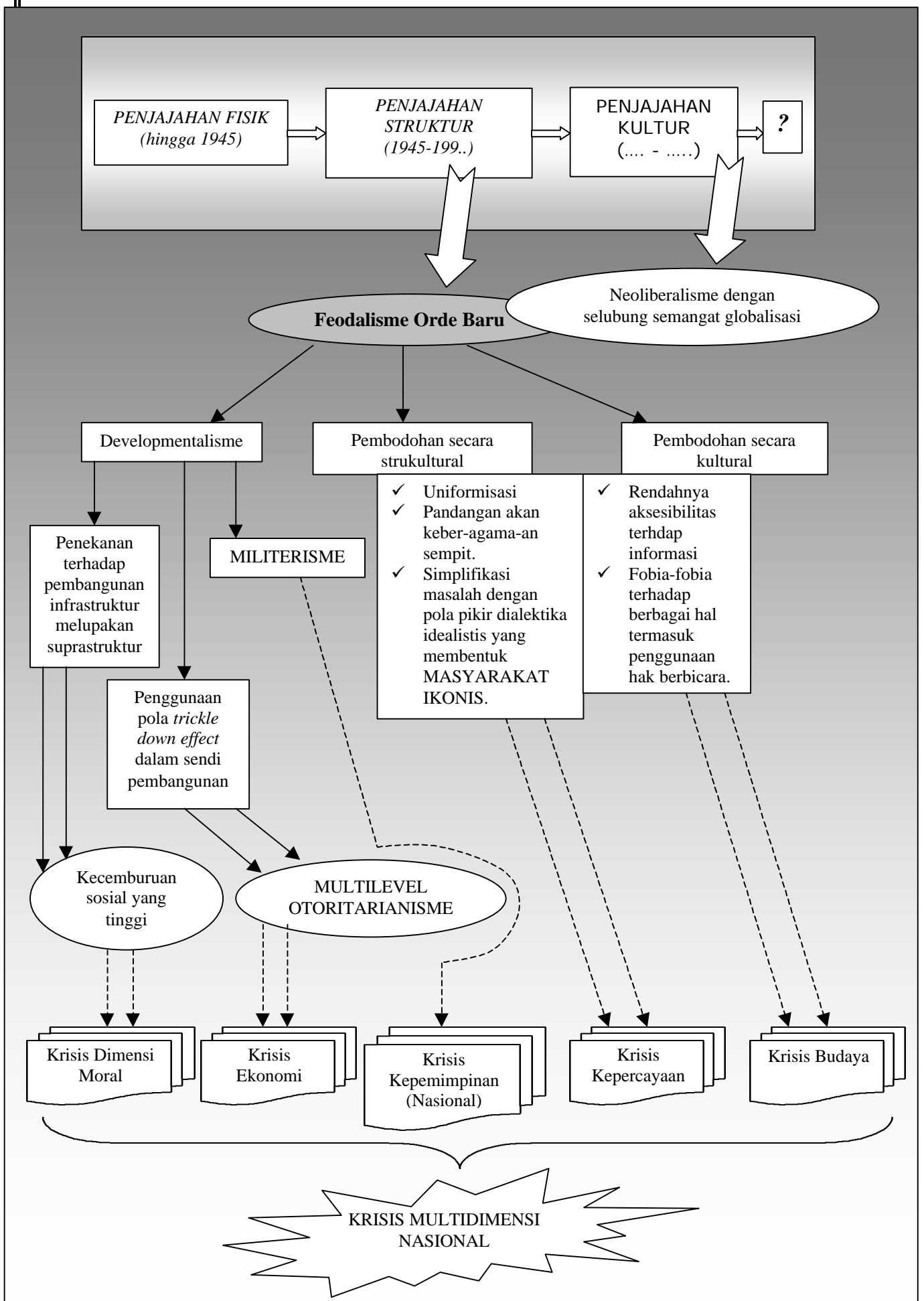
Ini semua menghasilkan krisis multidimensi yang merusak sendi-sendi masyarakat dan mengingkari hasrat dan landasan utama individu dalam bermasyarakat: menjadi manusia seutuhnya untuk mencapai kebahagiaan yang seoptimum mungkin.

c. Penjajahan Kultural (...-...)

Belum lagi selesai dari permasalahan multidimensi itu, struktur ternyata tidak melakukan pembodohan untuk meraup keuntungan sendiri: ia membuka peluang terhadap pola penjajahan kultural yang semakin membodohi masyarakat – membentuk masyarakat konsumeristik yang tak kenal dengan krisis yang sedang ia alami (kehilangan *sense of crisis*). Terjadilah *social gap* yang sangat besar antara golongan ekonomi lemah, sedang, dan kuat. Di saat pengaruh luar kekuatan besar hantu globalisasi membayangi rakyat dengan produk-produknya (karena memang negara-negara seperti Indonesia ini hanya menjadi sekadar pasar bagi *over-production*-nya), kita ribut dalam masalah yang seharusnya sudah lama hilang: konflik etnis, agama, dan golongan. Kita semakin terpuruk...

ini direkomendasikan buku: “*Race et Histore*”, (terjemahan: Ras dan Sejarah), Claude Levi-Strauss, LkIS, Yogyakarta, 2000.

⁹ Dewey, John, “*Philosophy of Education*”, Penguin Books, New York, 1978.



Solusi Yang Tak Menjawab

"Saya tidak berkata: mari ikut memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik. Saya selalu berkata: mari memasukan Irian Barat ke dalam wilayah 'Kekuasaan' Republik."

(Pidato Presiden Soekarno, 17 Agustus 1961)

Kondisi multidimensionalitas krisis yang melanda bangsa Indonesia tentu saja disadari oleh para pemimpin dan akademisi Indonesia. Ini pulalah yang mendorong timbulnya berbagai alternatif solusi yang dapat meramaikan pula bursa pentas politik: solusi yang mana yang akan dipilih. Tentu setiap solusi memiliki konsekuensi logis tertentu dan tiap pihak akan berusaha memberikan "solusi" yang paling kecil kemungkinan pihaknya terkena berbagai getah akibat krisis multidimensi ini.

1. Pergantian Pemegang Kekuasaan Eksekutif

Beberapa kawan yang aktif di pergerakan mahasiswa dalam kelembagaan lembaga formal kampus: BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Januari hingga Februari 2001 yang lalu mengusulkan turunnya Presiden GusDur karena dinilai ia telah terlibat dalam praktik KKN dalam kasus BULOG-gate dan BRUNEI-gate. Terlepas dari keheranan kita akan kebulatan isu yang dibawa ke kawasan gedung DPR/MPR, tuduhan-tuduhan akan ketidakmurnian lagi mahasiswa (dalam kelembagaan BEM) dalam koridor moral yang selama ini dikenal, ada beberapa hal yang naif dari tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa ini.

Sudah jelas sekali bahwa sistem politik di negara kita merupakan sistem politik yang aneh untuk sebuah negara yang lahir di tengah arus modernisasi, di mana demokasi, liberalisasi di berbagai bidang, dan penjungjungan setinggi-tingginya terhadap hak asasi manusia. Partai pemenang PEMILU 1999 (PDI Perjuangan) hampir saja menjadi oposisi jika saja Megawati Soekarnoputri tidak menjadi wakil presiden RI. GusDur, pada dasarnya bukanlah seorang pemain politik yang begitu aktif jika dibandingkan dengan Amin Rais, Megawati, dan sederetan nama politisi nasional kita, namun kongkalikong yang terjadi (dan sekali lagi terpisah dari kondisi sosiologis masyarakat luas) melahirkan sebuah fraksi terbesar bernama Poros Tengah yang mendorong GusDur untuk duduk di kursi kepresidenan.



Beberapa waktu kemudian, masih poros tengah bermain lagi, dengan memberikan legitimasi kepada Panitia Khusus (PANSUS) DPR untuk memeriksa keterlibatan presiden dengan kasus BULOG dan dana sumbangan dari Sultan Brunei. Pansus yang memang dimotori oleh elite dari fraksi-fraksi poros tengah ini akhirnya berhasil "meyakinkan" DPR untuk memberikan dua kali memorandum kepada Presiden. Poros tengah yang dahulu menaikkan GusDur sebagai presiden, dalam waktu kurang lebih setahun telah menggoyang lagi GusDur. Dan karena konflik elite ini ribut di atas dan terpisah dari rakyat, maka tak banyak yang

benar-benar mengerti permasalahan ini. Yang pasti memang pemerintahan GusDur masih dapat dibilang buruk melihat semangat reformasi yang menjatuhkan Soeharto beberapa tahun yang lalu. Namun pada dasarnya boleh dibilang karena reformasi yang kita miliki adalah reformasi karbitan yang hanya menjungkalkan seorang pimpinan politik, seorang *GodFather*: Soeharto, namun sistem yang selama 32 tahun telah diobok-oboknya tidak disentuh sama sekali, atau pun kalau disentuh tidak seintensif dan berkesan seperlunya. Ini yang membawa dialektika bahwa pada masa itu PEMILU merupakan satu-satunya jalan untuk meneruskan agenda reformasi.

Sistem yang jelek tentunya tak akan merubah keadaan. Rakyat begitu percaya kepada mahasiswa pada masa Orde Baru karena hampir tidak ada satupun lembaga publik yang bisa dipercayai mekanismenya dalam aspirasi dan advokasi kepentingan rakyat. Dan kondisi yang sama terjadi saat ini setelah Soeharto turun dari jabatannya. Inilah landasan dasar kita untuk



menyatakan bahwa memaksa turunnya GusDur dan menggantikannya dengan Megawati tidak akan secara signifikan mengubah keadaan. Yang terjadi pada akhirnya hanyalah ransformasi penguasa dengan sistem yang tetap. Mengutip Lord Acton, "...power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely."

Sistem yang buruk tak akan merubah keadaan malah lebih mungkin memperburuknya. *Garbage in Garbage Out (GIGO)*, di mana sistem kita tak memiliki mekanisme politik yang menjaga para penguasa dalam terminologi moralitas dan nilai etika.

Memaksa presiden saat ini turun dari jabatannya dan menunggu wakil presiden untuk naik sebagai penggantinya takkan menyelesaikan persoalan karena yang terjadi hanyalah perubahan penguasa yang tetap saja memiliki kecenderungan untuk korup karena memang sistemnya belum dibenahi, dan kita semua masih dipimpin manusia yang sangat manusiawi berbuat kesalahan – meskipun kesalahan itu tak boleh dibenarkan saat ia telah berurusan dengan keburukan dan pengkhianatan terhadap cita-cita seluruh rakyat saat membentuk masyarakat negara. Dengan kata lain, sebelum mengganti penguasa seharusnya ada semacam revolusi sistemik yang memperbaiki sistem kekuasaan yang ada terlebih dahulu.



2. Otonomi Daerah versi UU no.22/1999

Keresahan yang terjadi di berbagai pelosok negeri telah mengeluarkan alternatif solusi untuk mengatasi masalah ini. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, dikeluarkanlah UU no 22/1999 tentang keterlaksanaan otonomi daerah. Ini mungkin bentuk varian (yang paling moderat) daripada menggugat sebuah bentuk negara kesatuan RI yang ada selama kepemimpinan Soekarno dan Soeharto – pola sentralisme pemerintahan akan diubah ke bentuk pola desentralisasi pemerintahan yang diharapkan akan mendorong kemajuan daerah dan memberikan pemerintahan daerah dalam mengelola potensi daerahnya sendiri. Namun data pada tabel 4.1. di bawah akan menunjukkan bahwa multilevel otoritarian ternyata benar-benar ada dan ini akan merangsang timbulnya raja-raja kecil di daerah (alumni) pendidikan Orde Baru yang akan mendapatkan legitimasi untuk melakukan penghisapan lebih leluasa.

Tabel 4.1.
Munculnya raja-raja kecil di daerah

Daerah	Konflik daerah
Aceh	✓ Operasi militer selama Orde baru telah menimbulkan pengalaman traumatik masyarakat Aceh. Momen jatuhnya Soeharto telah memberanikan seorang pria tak dikenal memukul

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ mantan Gubernur Aceh Ibrahim Hasan di Hotel Cempaka, agustus 1999. ✓ 5 Juni 1998, Gubernur Aceh Sjamsuddin Mahmud memutuskan mengusulkan penggantian Sekretaris Wilayah Daerah (Sekwilda) Malik Ridwan Badal dan menggeser sejumlah pejabat lain yang ada hubungan keluarga dengannya. ✓ Di Kecamatan Bakongan, 530 kilometer dari Banda Aceh, ratusan warga merusak rumah camat dan membakar mobil dinas, akhir tahun lalu. Massa marah karena beras murah jatah keluarga prasejahtera dijual atas persetujuan camat.
Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemilihan gubernur Sumatera Utara: Rizal Nurdin dituduh telah direkayasa. ✓ Mei dan Juni 1998 mahasiswa dan berbagai Ormas menuntut walikota Medan dan Tanjung Balai agar mundur dengan tuduhan melakukan KKN. ✓ Di Daerah Transmigrasi Sosa, Tapanuli Selatan, 60 warga mengirim delegasi ke DPRD dan menuntut bupati mundur kalau tidak mampu membangun daerahnya. Sementara itu, lebih dari seratus warga berunjuk rasa di Kantor DPRD Langkat dengan berbagai tuntutan, antara lain membersihkan KKN di dalam pemerintahan ✓ Tanggal 13 Juni 1998 massa sempat menduduki DPRD Tapanuli Utara di Tarutung menuntut mundur Bupati oleh tindakan korupsi. ✓ Peristiwa berdarah nyaris terjadi di Balige pada bulan berikutnya. Camat, Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek), dan Komandan Rayon Militer (Danramil) Balige lolos dari pengeroyokan dan hadangan massa
Jambi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemilihan Bupati Kerinci periode 1998-2003 dinilai tidak murni disertai unjuk rasa di depan Kantor Gubernur, menuntut agar Mendagri menolak calon yang diusulkan DPRD.
Riau	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebanyak 2000 mahasiswa mendemo Gubernur Suropto karena diduga terlibat KKN. ✓ Di Pekanbaru, massa merusak gedung DPRD, dan mahasiswa mendudukinya. Tuntutan mereka: Gubernur Soeripto, Kepala Direktorat Sosial dan Politik (Kaditsospol) Paris Ginting, serta Wali Kota Pekanbaru Oesman Efendi Afan mundur dalam 2 x 24 jam karena diduga terlibat KKN.
Sumatera Selatan	Di Palembang, Forum Reformasi Sum-Sel dan Komando Reformasi Sum-Sel meminta DPRD Palembang mencabut dukungan kepada Husni sebagai calon wali kota kedua kalinya. Forum ini menghitung ada tujuh saudara dekat Husni yang memegang jabatan struktural pemerintah daerah (pemda).
Lampung	Keluarga Besar Mahasiswa Lampung Utara meminta kejaksan memeriksa Bupati Lampung Utara, A. Gumbira, karena diduga berpraktek KKN.
D.I. Yogyakarta	Mahasiswa dan sejumlah warga berunjuk rasa di DPRD Bantul, meminta Bupati Sri Roso Sudarmo mundur karena banyak masalah hukum yang terjadi dalam kepemimpinannya. Dia tokoh yang sering dikaitkan dengan kematian wartawan <i>Bernas</i> Fuad Muhammad Syafruddin (Udin).
Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Propinsi ini termasuk paling sering dilanda demonstrasi untuk tingkat perangkat desa. Contohnya saat demo menuntut Suwandi, Kepala Desa Krajanbogo, Demak, mundur, oleh karena praktik penyelewengan. Peristiwa ini menewaskan tiga orang dan satu orang luka parah. ✓ Di Semarang, Serikat Mahasiswa IAIN Walisongo menemui anggota DPRD Ja-Teng. Mereka menuntut kekayaan Gubernur Soewandi diusut tuntas karena dia dianggap mengurus kekayaan Ja-Teng untuk pribadi. ✓ Di Tegal, ribuan mahasiswa dan rakyat turun ke jalan dengan tuntutan agar Wali kota Tegal M. Zakir turun dari jabatannya karena dianggap menyuap mahasiswa dan tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, DPRD Kota Madya Tegal mencabut dukungan kepada H.M. Zakir dan mengusulkan kepada Mendagri agar ia diberhentikan dari jabatan wali kota. ✓ Demonstrasi massa marak di Banyumas dan Kebumen, memaksa kepala desa (kades) mengundurkan diri. Para kades meminta jaminan keamanan. Masih di Kebumen, ratusan buruh dan pengusaha genteng di Kecamatan Sruweng mendatangi markas kepolisian sektor (mapolsek) dan mendesak kepala polsek memindahkan empat oknum anggotanya karena sering meresahkan rakyat dengan melakukan pemerasan. ✓ Sehubungan dengan sorotan dan desakan masyarakat, tiga orang bupati di Ja-Teng diperiksa Bakorstanasda Ja-Teng. ✓ Pada akhir tahun lalu, sejumlah warga Desa Sonjokerto menyandera Camat Leksono, Kabupaten Wonosobo, Luluk Rustanto Adi, karena dianggap tidak menghiraukan pengaduan masalah pemilihan kades yang curang dan ada permainan uang.
Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mahasiswa menyoalkan Nuriana memberikan lahan Jonggol Asri kepada putra Soeharto untuk menduduki jabatan kedua kalinya. Dalam pemilihan suara bulan Mei, Nuriana kembali mendapat suara terbanyak. Sementara itu, Gerakan Reformasi Bandung, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ja-Bar, Ekspone '66, dan Forum Bandung untuk Reformasi Sejati menilai Nuriana tidak layak memegang jabatan Gubernur Ja-Bar. Selain pemilihan April lalu dianggap tidak aspiratif, Nuriana diduga terlibat KKN. ✓ Di Tasikmalaya, sekelompok mahasiswa dengan nama Solidaritas Mahasiswa untuk Kedaulatan Rakyat (SMKR) mendatangi Gedung DPRD Tasikmalaya dengan beberapa tuntutan. Rekan mereka—100 mahasiswa, sarjana, dan berbagai komponen generasi muda—mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Lebak, Rangkasbitung. Tuntutannya: DPRD tidak mencalonkan lagi Didin Muchjidin sebagai Bupati Lebak karena terlibat KKN. ✓ Di Tangerang, bawahan menuntut atasan. Sejumlah 10 lurah dan seorang sekretaris camat mengajukan permohonan pengunduran diri dengan alasan tidak tahan dengan kepemimpinan Camat Tangerang, Mulyadi. Camat ini dianggap tidak memahami masalah, arogan, kasar, dan berorientasi materi. ✓ Di Bogor, ratusan massa dari empat desa melakukan unjuk rasa di tempat terpisah untuk menuntut mundur empat kades. Penyebabnya, antara lain, para kades itu ditengarai menjual tanah kuburan, desa, dan rawa, serta bersikap buruk. Sementara itu, enam tokoh masyarakat Desa Sentul menuntut kadesnya, Ending Zaelani, diberhentikan dengan tidak hormat karena bertindak sewenang-wenang membangun rumah pribadi di lahan milik Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, kades dinilai menyalurkan dana kepada yang tidak berhak serta bersikap angkuh dan enggan

	<p>bermasyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sementara itu, rumah Kades Sukahati, Danny, di Kecamatan Citeureup dilempari massa. Tindakan ini dilakukan sebagai protes kepada Danny yang jarang berada di balai desa untuk melayani masyarakat. ✓ Di Pandeglang, sejumlah tokoh masyarakat Kecamatan Cimanggu meminta dua kepala desa diturunkan dari jabatan karena tidak memiliki ijazah SD dan belum berpengalaman sebagai pamong desa. Keduanya, yang dilantik dua bulan lalu, diduga keras hasil rekayasa Camat Cimanggu, U. Suryadi. ✓ Seorang camat di Kabupaten Cianjur bahkan ditahan kejaksaan atas tuduhan melakukan tindak pidana korupsi, yakni menerbitkan akta jual beli atas sebidang tanah milik kelurahan. ✓ Massa membakar mobil dinas Camat Rajagaluh, Majalengka, sesuai pemilihan Kepala Desa Lengkong Kulon. Massa menilai pemilihan ini curang dan Camat Ahmad Subagdja selaku kepala wilayah harus bertanggung jawab. ✓ Di Bekasi, ratusan warga dan mahasiswa melakukan unjuk rasa damai pada pelantikan bupati periode 1998-2003.
Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ribuan massa memblokir jalur Surabaya-Gresik. Sebelumnya, mereka menyandera camat dan lurah di kantor kelurahan. Kemarahan massa antara lain disebabkan oleh kasus jual beli tanah. Pengalaman itu membuat ratusan kades dan perangkatnya dari Kabupaten Nganjuk terimbas takut. Mereka mendatangi DPRD untuk meminta jaminan keamanan dan politik bagi kades. Gangguan ini disebabkan oleh munculnya tuntutan rakyat agar mereka mengundurkan diri. Dari 227 desa dan kelurahan di kabupaten ini, 115 desa mengalami nasib didemo warga. ✓ Di Madura, 150 massa di Kabupaten Sumenep merusak lima mobil pejabat pemda setelah merasa ditolak pimpinan DPRD setempat. ✓ Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Reformasi Masyarakat Ponorogo menduduki gedung DPRD setempat, dengan tuntutan mendesak Bupati Ponorogo Markum Singodimedjo turun dari jabatannya karena dinilai tidak berhasil menuntaskan berbagai KKN. ✓ Massa pengunjuk rasa dari berbagai desa di Kecamatan Ngawi merusak kantor dan lampu di lingkungan Pemda Ngawi. Mereka kecewa dengan Bupati Subagyo yang belum juga mengambil tindakan terhadap perangkat desa yang mereka tuntutan mundur karena korupsi.
Kalimantan Timur dan Barat	Di Samarinda, sekitar 50 pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Anti-KKN mendesak agar DPRD menolak surat persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap calon gubernur 1998-2003. Sementara itu, di Pontianak, orang menuntut mundur Gubernur Aspan Aswin.
Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Antara Mei dan Agustus 1998, mahasiswa melakukan demo di Ujungpandang, termasuk menduduki Gedung DPRD Sul-Sel, menuntut agar Gubernur Palaguna mengundurkan diri. Palaguna, seorang militer, dituding menjadi biang KKN dan feodalisme, antara lain dengan menghadiahkan mobil mewah Pajero kepada para bupati serta wali kotanya. Palaguna terlalu kuat. Dia justru mencopot Sekwilda dan Camat Bontonompo serta Camat Kajuara, yang merupakan keluarga dekat beberapa bupati. ✓ Di Maros, Kejaksaan Tinggi Sul-Sel menunggu persetujuan Mendagri untuk memeriksa Bupati Nasrun Amrullah yang menjadi tersangka kasus korupsi Rp 1,4 miliar. Sementara itu, kerusuhan meledak, mengakibatkan 11 kantor pemerintahan dibakar massa yang kecewa dengan janji Tim Penyelamat Dana Nasabah Kospin (TPDNK) yang akan mengembalikan uang dana kospin (koperasi simpan pinjam). ✓ Di Jeneponto, Kantor DPRD Tingkat II, Kantor Dinas P dan K, dan Kantor Dinas Tata Kota dibakar massa yang memprotes pelantikan calon bupati terpilih karena dia diduga melakukan suap dengan membeli suara dalam sidang paripurna DPRD. Tapi Gubernur Palaguna tetap melantik Dr. Ir. Baharuddin Tika di rumah jabatan bupati besarnya.
Sulawesi Tengah	Mahasiswa melakukan demo untuk memprotes proses pencalonan Bupati Luwu Lutfi Mutty karena dinilai berbau KKN dan menggunakan pola lama berupa <i>dropping</i> dari pusat. Di Poso, massa melempari rumah kediaman resmi bupati dan berusaha membakarnya.
Sulawesi Utara	Bupati Gorontalo, Wali Kota Bitung, dan Wali Kota Gorontalo didemo secara bersamaan. Tuntutannya: mundur karena terlibat KKN dan tidak bersih diri. Di Manado, Gubernur Sulawesi Utara R.E. Mangindaan mengakui banyak aparatnya yang brengsek, terlibat KKN, dan arogan dalam jabatan. Ia mengatakan tidak segan menindaklanjuti laporan masyarakat.
Nusa Tenggara Timur	Pemilihan calon Bupati Belu diwarnai kerusuhan. Sekitar 200 mahasiswa menuntut pemilihan dibatalkan karena mereka tidak puas dengan proses penjaringan dan pencalonan calon (bakal calon) serta tidak menginginkan kembalinya dr. Servatius Muti Pareira, M.P.H. sebagai bupati 1999-2004.
Bali	Pada Mei 1998, ratusan aktivis di Denpasar mendesak I.B. Oka mundur sebagai menteri. Aksi ini membesar dengan tuntutan meluas pada Juni, ketika ribuan masyarakat Bali dan mahasiswa menuntut I.B. Oka mundur sebagai menteri—juga beberapa pejabat daerah, antara lain Ketua DPRD I Bali, Ketua DPRD Buleleng, Bupati Buleleng, Ketua DPRD Gianyar, dan Bupati Gianyar. Setelah DPRD Bali dan Buleleng sempat sepakat mengundurkan diri massal, keputusan itu kemudian diralat setelah mereka bertemu dengan Mendagri.
Nusa Tenggara Barat	Pejabat yang digugat karena KKN antara lain Bupati Lombok Tengah, Bupati Dompu, dan Bupati Sumbawa. Forum Komunikasi Ekspone '66 NTB meminta DPRD NTB membentuk komisi investigasi kekayaan gubernur dan pejabat yang diduga terlibat KKN.
Irian Jaya	Kelompok Peduli Hak Asasi Manusia Irianjaya berunjuk rasa ke DPRD. Mereka mendesak agar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia didatangkan untuk meneliti pelanggaran hak asasi di Irian.

Disarikan dari Majalah TEMPO, No. 17/XXVII/26 Januari – 1 Februari 1999.

Multilevel otoritarian ternyata telah berdampak begitu luas hingga ke daerah-daerah terpencil, dan inilah yang sangat dicurigai terhadap efek negatif dari

dijalankannya otonomi daerah. Lebih naif lagi adalah bahwa UU no.22 dijalankan dengan landasan bukan pemberian hak otonomi terhadap daerah propinsi, namun lebih kecil lagi yakni daerah kabupaten, yang akan semakin mengkompleks-kan tingkat konflik masyarakat daerah dan melupakan sebuah cerita besar penghisapan oleh Soeharto. Tiap daerah akan bicara soal koruptor di daerahnya dan koruptor tingkat pusat pada masa ORBA akan dapat melenggang dengan selamat.

Berdasarkan polling yang dilakukan oleh KOMPAS¹, ternyata sebagian besar reponden sangat mengkhawatirkan praktik KKN yang selama Orde Baru sentralistik, menjadi bentuk praktik KKN di tingkat daerah.

**Tabel 4.2. Hasil polling KOMPAS,
"Apakah anda khawatir dengan praktik KKN di kalangan
pemerintahan desa?"**

Khawatir	Tidak khawatir
67%	26,5%

Dengan penggambaran ini ternyata, premis yang mengatakan bahwa otonomi daerah merupakan solusi yang efektif gugur oleh karena ketidakrasionalan yang terlihat dalam memandang realitas sosial yang ada. Otonomi daerah jika dipaksakan berjalan malahan akan menimbulkan mudarat yang bukannya semakin mengintegrasikan semangat berbangsa dan bernegara malah menjadi pemicu konflik sosial yang lebih menghebohkan.

3. Pemilihan Umum Secepat-secepatnya

Gonjang-ganjing dan perdebatan elite politik yang ada sekarang telah memisahkan masalah kebangsaan dengan masalah rakyat. Perdebatan yang menajam antara legislatif dan eksekutif telah memperancu permasalahan nasional. Momen reformasi untuk merobek semua sistem yang mengkhianati semangat republik dan demokrasi ini telah gagal dengan menjadikan masalah rakyat tetap menjadi masalah elite politik dengan dijalankannya pertemuan Ciganjur pada masa yang lalu yang dirasakan meredakan kemarahan publik yang tengah memuncak konsentrasi unjuk rasanya pada Mei 1998 yang lalu. Konflik yang menjatuhkan Soeharto dan tetap menjadikan panggung politik nasional hanya milik elite politik tanpa keterlibatan rakyat secara langsung malahan melahirkan PEMILU 1999 yang dianggap akan dapat memberikan nuansa reformasi (baca: pembaharuan).

Tak salah sepertinya dikatakan bahwa Pemilu 1999 merupakan penipuan massal bangsa (*mass deception*) dengan jargon jujur dan adilnya dan pengikutsertaan mahasiswa sebagai pengawas PEMILU – bisa dibayangkan betapa rakyat percaya pada PEMILU ini oleh partisipasi mahasiswa dalam PEMILU ini – karena mahasiswa menjadi golongan eksklusif pejuang reformasi yang satu-satunya dipercayai rakyat luas.

Namun tipu-tipu ini pada akhirnya akan terbuka juga dengan sendirinya. Dan pelaksanaan PEMILU di saat-saat sekarang ini hanyalah mengulangi sejarah lama. Masyarakat ikonis kita memilih bukan oleh karena suatu harapan bahwa si partai akan memenangkan pemilu dan menjadi aspiratornya, bukan pula oleh karena *track record* si partai dalam membela nasib dan kepentingan entitas masyarakat: masyarakat masih memilih oleh sentimen emosionalitas yang menjadikan kompetensi menjadi faktor prioritas kedua terpenting untuk memilih, setelah agama, tradisi, dan sebagainya.

Di sisi lain, pada bagian awal tulisan ini diuraikan bahwa revolusi sistemik dibutuhkan lebih dari sekadar perlu, namun keharusan, jika memang kita berniat memiliki *good and clean government-ship*. Artinya adalah percuma untuk

¹ Polling dilakukan pada tanggal 17 Maret 2000 di 13 kota besar Indonesia dengan *sampling error* 2,8%.

menjalankan PEMILU jika sistem pasca PEMILU ternyata sama-sama saja, dan hanya akan berdampak sama seperti bagian pertama tulisan ini, bahwa yang terjadi hanyalah perubahan penguasa, bukan sistem yang mengatur penguasa agar kekuasaannya terbatas dan kedaulatan tetap berada di tangan rakyat.

PEMILU secepat-cepatnya adalah naif karena pada dasarnya kita tidak butuh kepemimpinan nasional yang baik bagaikan dewa atau malaikat, *plus* kondisi masyarakat ikonis kita yang begitu rentannya terhadap isu. Kita tidak membutuhkan pimpinan nasional dalam waktu singkat, kita membutuhkan bangsa dan rakyat yang memiliki kepemimpinan dalam artian memiliki karakter pemimpin yang sadar hak dan kewajibannya sebagai warga negara, memiliki integritas sebagai bangsa, memiliki kesadaran akan pluralitas dan heterogenitasnya, dan memiliki kreativitas yang digunakannya sebagai pembangkit berbagai alternatif solusi dalam setiap permasalahan yang ia temui. Inilah inti reformasi yang seharusnya mengingat berbagai pembodohan yang dilakukan oleh ORBA selama lebih dari 3 dasawarsa.

4. Membangun Gerakan Kebangsaan Baru

Salah satu kealpaan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru adalah dengan tidak membiarkannya kesadaran dalam masyarakat akan setiap aksi pembangunan infrastruktur yang dilakukannya –karena memang ia sudah lama turun jika kesadaran rakyat telah terbangun sejak awal. Seharusnya setiap ada bentuk pembangunan timbul kebangsaan baru di tengah-tengah rakyat akan hasil pembangunan yang ada.

Ini dicoba digagas melalui kampanye gerakan kebangsaan baru yang seringkali didengungkan akhir-akhir ini oleh tokoh masyarakat seperti Nurcholis Madjid, dan beberapa pengamat dan pelaku perekonomian nasional². Maksud dari gerakan ini adalah untuk menghasilkan semacam kontrak sosial baru sehingga menimbulkan kesadaran berbangsa dan bernegara yang baru yang lambat laun akan mengatasi krisis multidimensi masyarakat yang ada; lebih jauh lagi adalah bagaimana agar tiap entitas masyarakat merasa dirinya sebagai sebuah bangsa sehingga menimbulkan solidaritas organis³ di kalangan masyarakat luas yang saling percaya satu sama lain dan terintegrasi untuk membangkitkan kembali bangsa yang pernah jaya: Indonesia.

Dalam tataran normatif, gerakan untuk membangun kebangsaan baru merupakan gerakan kultur yang mencoba bersandar kepada kesadaran masyarakat luas tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun ada beberapa pihak yang menerjemahkan gerakan kebangsaan baru sebagai upaya untuk menghadirkan referendum tentang perlu tidaknya kita bersatu dalam wadah negara kesatuan RI; dengan kata lain sesegera mungkin mengembalikan kedaulatan negara kepada rakyat yang ada sekarang – teknisnya bisa melalui referendum atau pemilihan presiden yang diadakan secara langsung (tidak menggunakan sentimen kepartaian lagi).

Jika pengertian pembangunan kebangsaan baru diterjemahkan demikian, maka di sini dirasakan kekurangan empatinya terhadap kondisi sosiologis masyarakat kita. Bisa dibayangkan saat akses informasi begitu rendahnya dan kemampuan pemahaman literer rakyat sedemikian rendah (lihat tabel 4.3.), ditambah kondisi perekonomian yang rentan kecemburuan sosial, serta ikonisasi yang terjadi dalam masyarakat, maka yang ada dalam benak masyarakat kita adalah keinginan untuk mengambil solusi instan – dan ini tak ayal lagi adalah disintegrasi bangsa⁴. Bahkan otonomi daerah-pun seringkali dirasakan memicu keinginan untuk disintegrasi bangsa (lihat tabel 4.4.).

² KOMPAS, Kamis, 3 Mei 2001.

³ Dalam terminologi sosiologis Emile Durkheim, *“The Division of Labour in Society”*, 1893.

⁴ Penyimpulan model ini dapat dikaji dalam *“Teori Komunikasi Massa (terjemahan)”* Edisi Kedua, Denis Mquail, Penerbit ERLANGGA, Jakarta, 1989.

Tabel 4.3.
Aksesibilitas Masyarakat Indonesia (di atas 10 tahun)
terhadap informasi (1997)
dan tingkat pendidikan nasional (1998)

Penduduk mendengar radio siaran	59,17%
Penduduk menonton televisi	78,22%
Penduduk membaca koran/majalah	22,83%
Penduduk mampu berbahasa Indonesia	89,19%
Penduduk yang mampu membaca	89,42%
Penduduk lulus SLTA	16,7%
Penduduk lulus SLTP	13,92%
Penduduk lulusan SD	32,99%
Penduduk tak bersekolah	10,0%

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Tabel 4.4. Hasil polling KOMPAS:
"Apakah Otonomi Daerah Meredam Keinginan Disintegrasi?"

Kota	Ya	Tidak
Jakarta (690)	41,7%	46,7%
Surabaya (250)	39,6%	40%
Medan (99)	49,5%	32,3%
Makassar (75)	41,3%	50,7%

Polling diadakan 28-29 Maret 2000 pada 1114 responden acak di 4 kota besar Indonesia dengan *sampling error*: 2,9%.

Bisa dibayangkan jika bangsa ini telanjur ke dalam disintegrasi. Disintegrasi akan memecah Indonesia ke dalam berbagai vektor yang arahnya tidak terintegrasi karena memang potensi tiap daerah tidak sama. Dan sejarah tidak pernah berhenti. Ia akan terus berjalan dan Indonesia yang terpecah-belah baik secara geografis maupun politis itu akan dengan mudah dikendalikan oleh kekuatan luar yang memang selama ini telah mengintai.

5. Bagaimana jika Disintegrasi?

Tak ada pihak yang menyengkal bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya – ia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan didukung oleh letaknya di khatulistiwa sehingga iklim Indonesia cukup memanjakan masyarakatnya. Di sisi lain, letak Indonesia yang strategis menjadi tempat transit yang nyaman bagi berbagai jalur pelayaran (transportasi laut) dan jumlah penduduk yang besar merupakan pasar yang sangat menarik penanam modal dan pemilik modal asing untuk menjadikan Indonesia sebagai kawasan pasarnya.

Itulah sebabnya bukanlah sebuah keheranan jika kita mendengar kabar bahwa untuk Asia Pasifik, Amerika Serikat begitu *concern* dalam hal pertahanan keamanan. Dikabarkan bahwa untuk Asia Pasifik, Amerika Serikat, dalam hal ini Pentagon, memiliki "mata" sebanyak 170 kapal induk perang (sekitar 130.000 awak tentara dan teknisi), angkatan darat AS sebanyak sekitar 60.000 pasukan, 70.000 personel angkatan laut, 47.000 awak pantai dan 12.000 personel di lepas pantai di 90 lokasi yang berbeda⁵. Sebagaimana Cina benar-benar merupakan hal yang "mengganggu" bagi Amerika, itulah sebabnya Amerika Serikat, khususnya pada pemerintahan George W. Bush sekarang ini (yang dipenuhi oleh orang-orang Pentagon) sangat tidak toleran terhadap poros India-Indonesia-Cina⁶, yang justru dibangun oleh Presiden GusDur akhir-akhir ini.

⁵ Data dari www.republic.com, *The Washington Post Company*. 26 Mei 2000.

⁶ Seperti diungkapkan oleh Kurnanto Anggoro dalam *Tempo Interaktif*, 15 Desember 2000, www.temponews.com.

Teritorial Indonesia merupakan teritorial yang tinggi luas lautnya: kepulauan (*archipelago*), dan dengan disintegrasi, betapa mudahnya kita menjadi daerah kekuasaan (langsung ataupun tak langsung). Dalam paradigma mereka, Indonesia merupakan negara yang perlu " diselamatkan" dalam rangka penyelamatan pasar yang potensial.

Belum lagi saat kita sebut pengaruh-pengaruh ekonomi lainnya yang tak kalah pentingnya seperti perjanjian terlanjur AFTA, APEC, dan WTO, yang seolah memaksa setiap negara untuk melanggengkan kapitalisme global. Orde Baru telah sangat memandulkan manusia Indonesia dan tentu saja pemilik modal asing, sebab ia *toh* tak ingin uang yang telah ditanamkannya di Indonesia lenyap begitu saja.

Indonesia selama ini selalu menjadi pasar, dan sebagai tempat pemasaran barang produksi dari yang memang disambut dengan gaya hidup (*developmentalis*) yang sangat konsumeristik. Disintegrasi bangsa akan melanggengkan neo-liberalisme ini yang melemahkan tiap "pecahan" Indonesia. Untuk menghadapi globalisasi seharusnya kita memperkuat diri dengan bersatu dan berkomitmen secara nasional untuk menyusun strategi menghadapinya bahkan jika perlu membentuk aliansi dengan negara-negara dunia ketiga lainnya. Disintegrasi akan sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.

Terpecahnya sebuah negara Indonesia di sisi lain akan melanggengkan Soeharto yang akan semakin sulit untuk diadili. Tiap daerah disintegrasi akan sibuk mengurus diri sendiri sementara penjahat Orde Baru tersebut tak akan pernah diadili, dan walaupun diadili (oleh pengadilan internasional) maka aset akan sulit untuk kembali kepada Indonesia sebagai bangsa, karena pemilik aset tersebut adalah negara Indonesia, disintegrasi bangsa akan mempersulit dan menjadikan kemustahilan pendefenisian Indonesia sebagai negara karena sudah terpecah-belah.

Masalah-masalah sebagai akibat dari disintegrasi tersebut akan teredam oleh emosionalitas dan kekecewaan selama ini – dan ajang referendum sebagai bentuk implementasi akan memperkeruh suasana dan sebagaimana diutarakan oleh tabel 4.4. semakin memperuncing suasana dan merangsang disintegrasi bangsa.

Politik Indonesia – oleh budaya feodalisme politik – selama ini selalu bersifat politik elite, dan adalah kewajiban elite politik yang memiliki sikap kebangsaan mengembalikan sistem politik ini menjadi benar-benar politik *bottom-up* yang mengakar ke rakyat, tidak secara ikonis belaka, namun membuat tiap elemen masyarakat mengerti akan permasalahan yang ada. Stop ribut soal kekuasaan politik berkedok perjuangan untuk rakyat – jika memang memiliki komitmen untuk perubahan, kesadaran kepada masyarakat adalah hal primer yang mesti dilakukan segera baru kemudian dengan parameter teknis tertentu semuanya dikembalikan kepada rakyat. Akhirnya, yang menentukan adalah rakyat yang mengerti eksistensinya sebagai warga negara, bukan rakyat yang ikonis, masih gampang terprovokasi, dan seterusnya.



ADAKAH SECERCAH HARAPAN?

*...orang yang berani melihat fakta realis,
pasti memiliki pandangan pesimistis...*

- Soe Hok Gie -

1. Sedikit Pendefinisian Masalah

Panjang lebar di atas, pada dasarnya telah membawa kita kepada beberapa pendefinisian masalah dalam pengertian krisis multidimensi sebagai berikut:

- a. **MULTILEVEL OTORITARIANISME** yang melahirkan praktik-praktik KKN secara bertingkat di berbagai lapisan masyarakat bahkan dikuatirkan merambah kepada integritas pergerakan mahasiswa. Ini pula yang menyebabkan kesulitan untuk menarik Soeharto ke meja hijau karena memang hampir seluruh oknum pemegang kekuasaan pada masa Orde Baru melakukannya oleh sistem yang dipaksa sedemikian.
- b. **Kultur konsumeristis** yang berkembang ternyata telah mengembangkan masyarakat yang sedemikian tidak kreatif dalam menyelesaikan masalah yang berbuntut ke krisis ekonomi, sehingga masyarakat cenderung mencari pemecahan masalah pribadi yang berkenaan dengan perut sehingga tidak mencari jalan dan akar permasalahan yang ada. Akibat lainnya adalah kecenderungan untuk memanfaatkan kondisi kekeruhan politik yang ada yang tentunya dipengaruhi oleh faktor di atas. Kultur konsumeristik ini pada dasarnya juga membuka lebar-lebar pada penjajahan budaya yang terjadi di sebagian besar negara dunia ketiga yang ditempatkan sebagai pasar oleh negara maju dan takkan pernah menjad garda depan perekonomian dunia.
- c. **MASYARAKAT IKONIS** yang cenderung mengkultuskan apapun termasuk pimpinan politik dan pimpinan masyarakat secara luas.
- d. **Sistem politik yang sangat buruk telah menghasilkan kebobrokan sistem yang mengkristal dalam birokrasi.** Sistem sosial pada dasarnya dipengaruhi oleh dua hal yakni mekanisme jalannya sistem dan pelaku sistem. Dalam peta politik nasional diakui bahwa sistem yang bobrok telah diisi pula dengan orang-orang dengan dimensi moral dan etika yang bobrok pula. Sisi lain yang perlu disoroti adalah adanya pola militeristik seiring dengan warisan orde baru, yakni dwifungsi ABRI, yang akhir-akhir ini mewarisi pola warga sipil bersenjata yang menggunakan kekerasan pula untuk menjalankan pola ikonisasi yang meliputinya. Di sinilah bangkitnya kekuatan lama (militer dan birokrat Orde Baru) yang merongrong sistem yang ada sehingga ia bisa lepas dari sistem hukum. Ini pula sebabnya hingga sekarang penjahat-penjahat Orde Baru tidak pernah bisa diadili sementara dosa-dosa mereka meliptui praktik KKN, serta berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air seperti pembantaian umat Islam di Tanjung Priok, kasus pembunuhan massal di Dilli, pembunuhan di Aceh, dan sebagainya. Semua kemungkinan peradilan ditutup oleh upaya-upaya perebutan kekuasaan dan ribut-ribut antara elite yang satu dengan yang lain. Artinya **sistem harus mendapat perbaikan** sehingga siapa pun penguasa yang ada akan menjalankan pemerintahan yang dapat

diakses oleh siapapun dengan pola demokrasi, dan penjahat-penjahat Orde Baru dapat diadili sesuai dengan kesalahan mereka.

e. **Keterpisahan antara konflik elite politik dengan permasalahan bangsa secara umum**, sehingga dengan mudah saja para elite politik asyik memperebutkan

kekuasaan sementara rakyat secara umum yang hanya memiliki akses (sebatas pemberitaan media massa yang juga seringkali provokatif dan cenderung berpihak kepada kepentingan elite politik tertentu) ribut-ribut satu sama lain, dan tak jarang menghasilkan pertumpahan darah antara pro dan kontra. Elite politik cenderung memanfaatkan sistem yang bobrok sebagai produk dari Orde Baru. Presiden sewenang-

wenang, tak peduli pada kondisi bangsa, asyik dengan kunjungan manca negara. Di lain pihak, DPR sebagai gerbang representasi seluruh rakyat pada kenyataannya tidak berperan aspiratif terhadap rakyat. Ia cenderung menjadi wakil partai dan bukan wakil rakyat, sementara partai membawa gerbong-gerbong kepentingan elite politik, dan rakyat hanya bisa gigit jari. Lebih jauh, bisa dikatakan bahwa DPR seperti tidak punya *sense of crisis*. Bayangkan gaji pokok anggota DPR adalah Rp 4,2 juta ditambah erbagai tunjangan sebesar RP 12 juta, belum lagi tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 35 juta pertahun, dan baru-baru ini tunjangan mesin cuci Rp 6 juta¹ - belum beberapa hari masyarakat diresahkan kenaikan harga BBM!

DPR ribut-ribut soal memorandum dan akhirnya penjatuhan presiden melalui mekanisme Sidang Istimewa (SI) yang bakal digelar 1 Agustus 2001 ini, sementara kenaikan BBM, TDL, dan telekomunikasi, ratusan RUU tak dibahas termasuk RUU Migas yang juga mengatur kecurangan-kecurangan di bidang pengadaan MIGAS dan harga BBM. Elit politik berkonflik dan rakyat semakin sengsara. Di samping itu ada ratusan RUU belum lagi dibahas oleh DPR, sementara ia menekan presiden bukan dengan isu yang aspiratif, ia menyerang presiden dengan kasus Bulog-gate dan Brunei-gate, kasus yang pada dasarnya jauh dari apa yang diaspirasikan rakyat secara umum. Memorandum I dan II dikeluarkan hingga sekarang menunggu Sidang Istimewa dengan rekayasa disusunnya Rantap untuk meminta pertanggungjawaban presiden dan mengganti presiden, sementara itu ratusan RUU tak dijamah, aspirasi rakyat dengan daya beli yang rendah (lihat tabel 5.1) yang kesulitan dengan harga-harga yang naik menyusul kenaikan BBM, tarif dasar listrik, dan telekomunikasi, penyelewengan dana BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) sebesar Rp 144,5 trilyun dalam bentuk dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dengan catatan kerugian Rp 80 trilyun², kerusuhan di berbagai tempat di Indonesia, kasus Aceh, dan berbagai hasil investigasi terhadap kejahatan birokrasi Orde Baru, sama sekali terbenam



¹ Sebagaimana diberitakan harian KOMPAS, 23 Juni 2001.

² Sebagaimana diberitakan harian KOMPAS, 4 Agustus 2000.

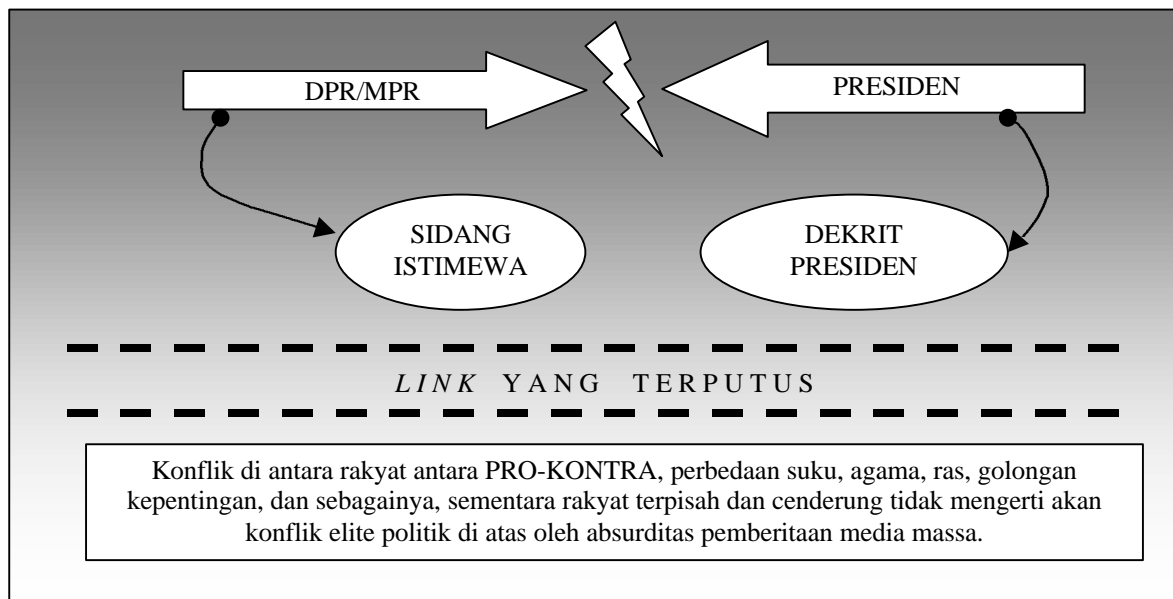
dengan hasil penyelidikan Pansus DPR untuk Bulog-gate dan Brunei-gate. Di lain pihak Presiden seperti mempermainkan-kondisi yang ada dengan ancaman-ancaman dikeluarkannya dekrit negara dalam keadaan darurat untuk membubarkan parlemen, lawatan-lawatan ke luar negeri yang tak jelas juntrungannya, beberapa kali (dengan politik dagang sapinya) mengganti menteri-menteri dan beberapa pejabat eselon satu, termasuk kontroversi penggantian Kapolri dan jajaran pimpinan TNI yang kontroversial.

Tabel 5.1
Perbandingan pendapatan perkapita beberapa negara
pada tahun 1998

Negara	Pendapatan perkapita (dalam US\$)
Malaysia	3670
Singapura	30170
Thailand	2160
Filipina	1050
Brunei Darussalam	24630
Indonesia	450

Sumber: "Human Development Report", UNDP, 2000.

Sementara itu semua terjadi, elemen-elemen rakyat terpolarisasi sesuai dengan patronase elite politik yang ada. Masyarakat terbagi-bagi dalam jebakan konflik elite pro-kontra ini-itu, antara agama yang satu dengan yang lain, suku, dan berbagai golongan kepentingan lainnya. Lebih jauh lagi, rakyat terputus dengan konflik elite, di mana konflik elite hanya berimbas kepada konflik horizontal yang semakin menyengsarakan rakyat.

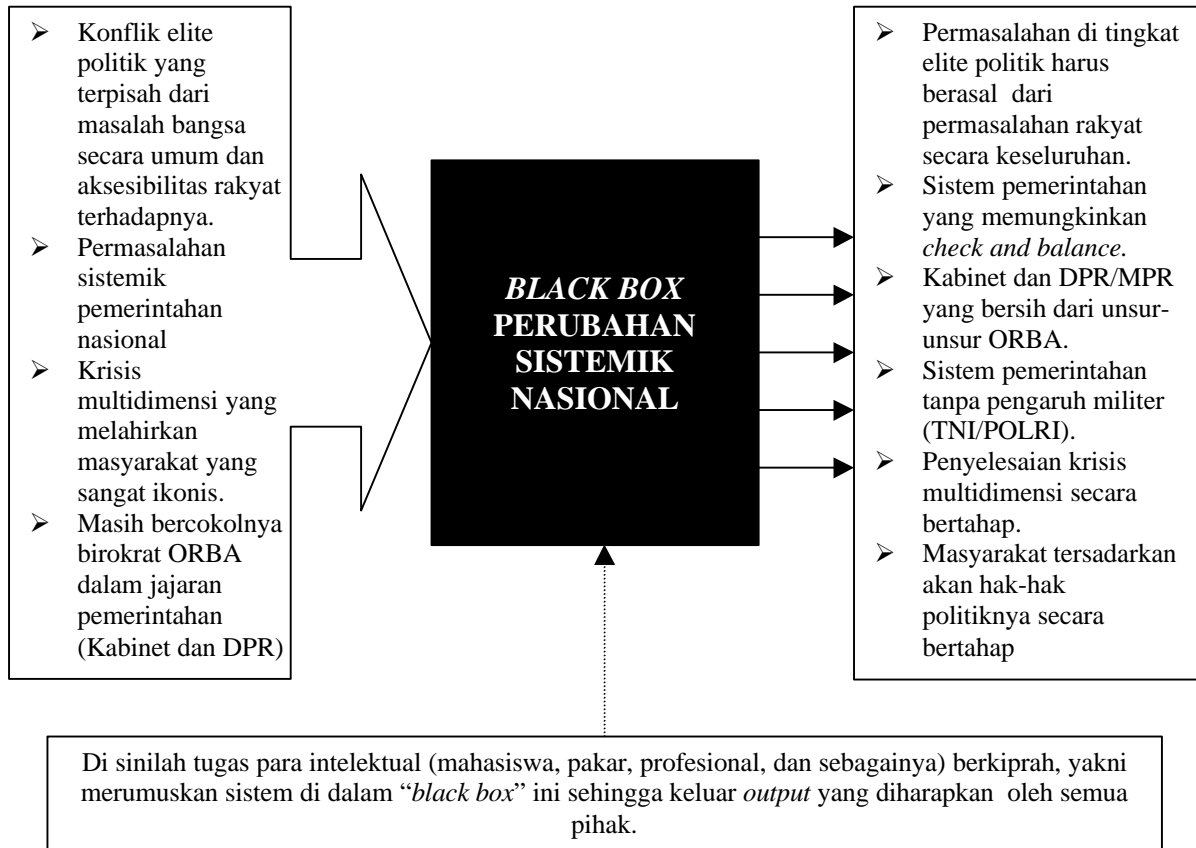


2. Adakah solusi buat kompleksitas masalah bangsaku?

Dengan tak bermaksud untuk melakukan simplifikasi naif terhadap kompleksitas masalah yang ada, bisa dikatakan bahwa secara struktural masalah kita ada pada sistem yang permisif terhadap konflik elite yang menyengsarakan masyarakat luas. Konflik elite inilah yang mesti dipotong dengan melakukan pembaharuan terhadap sistem pemerintahan yang ada.

Namun di sisi lain, rakyat yang secara kultural juga belum tersadarkan harus disadarkan akan permasalahan yang ada. Rakyat seluruhnya harus mengerti bahwa konflik elite inilah sumber biang keladi penderitaan dan penindasan yang dialami olehnya, bukannya malah terjebak dalam dukung elite yang satu dan anti

terhadap elite politik lainnya. Rakyat perlu disadarkan agar ia tak termakan oleh stigma-stigma politis dan ikonisasi yang seringkali disuarakan oleh media massa yang ada.



Bagaimana mengisi *black box* ini dengan kondisi sosiologis dan peta politik yang ada seharusnya menjadi bagian dari para intelektual nasional yang memang memiliki visi kerakyatan dan kebangsaan, bukannya malah memperpanas kondisi yang ada dengan berpihak kepada satu elite politik yang bertikai.

3. Bagaimana mengimplementasikan semua ini?

Mungkinkah Sidang Istimewa yang akan digelar ini dapat menjadikan dirinya sebagai *black box* bagi perubahan sistemik nasional? Tentu tidak, karena memang di dalamnya masih bercokol kekuatan lama (Orde Baru dan militer) yang memang masih ikut (dan tersebar dalam berbagai partai politik). Ia tidak mungkin melakukan sesuatu yang akan merugikan dan merusak posisinya sendiri. Ia akan berupaya melanjutkan upaya-upaya mempernyaman posisinya dalam Sidang Istimewa yang akan datang ini, apakah dengan kompromi dengan Presiden GusDur atau melengserkan Presiden GusDur.

Apakah dekrit presiden GusDur akan mampu melakukan perubahan sistemik? Tentu saja tidak juga. Karena ia akan berusaha mencari posisi aman (*safe*) terhadap keberadaan dirinya sendiri. Ia dengan sederetan nama menteri pengisi kabinet yang berada di bawahnya akan berusaha melanggengkan posisinya, minimal keberadaan dirinya dari jeratan hukum dan norma kemanusiaan yang ada.

Sementara itu, rakyat telah terjebak dalam kondisi yang sangat dilematis. Indonesia digugat keberadaannya oleh bangsa sendiri yang tak tahu ancaman-ancaman dari dalam dan luar negeri yang bakal menjagalnya dalam arus pasar dan modal; pasar bebas (AFTA dan WTO) telah siap untuk menyergapnya, dan modal asing akan terus-menerus menghantuinya.

Mungkin jalan satu-satunya adalah dengan mengorganisasikan kekuatan intelektual, dalam hal ini mahasiswa, kaum profesional, dan kaum pakar sosial dan tata negara yang memang berjiwa reformasi dan bervisikan kerakyatan dan kebangsaan. Dengan mengikuti alur konstitusi yang ada justru akan sangat sulit untuk melakukan perubahan sistemik sebab legalitas berada di tangan mereka yang ingin menyamankan posisi dan kekuasaannya. Namun pada dasarnya, legal formal dan hukum secara umum berada di tangan rakyat yang ingin menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara secara tuntas. Dan langkah untuk ini hanyalah dengan memaksa Presiden untuk mengeluarkan dekrit presiden yang berisikan *item-item* untuk perubahan nasional secara sistemik dan bervisi kerakyatan dan kebangsaan, yakni:

1. Pencabutan Dwi Fungsi TNI/POLRI

Ini merupakan bagian dari 6 visi reformasi yang dikhianati oleh pemerintahan yang ada sekarang. TNI/POLRI masih dengan bebas bercokol dan masih memiliki kekuasaan sosial politik, dan bukannya menjaga keutuhan nasional dari ancaman luar negeri. Hanya dengan jalan pintas dekrit rakyat inilah dwifungsi dapat dicabut secara cepat, yang berarti kekuatan militer dan aparat kepolisian berada di tangan presiden dengan kemanunggalan rakyat seutuhnya.

2. Pembekuan semua lembaga-lembaga negara antara lain lembaga kepresidenan, DPR dan MPR, dan Mahkamah Agung.

Presiden GusDur harus mundur dari jabatannya termasuk seluruh jajaran kabinetnya. Demikian pula dengan anggota DPR/MPR, harus mundur dan menghormati kehendak rakyat untuk melakukan revolusi sistemik yang ada.

3. Pembentukan pemerintahan transisional dengan basis Majelis Wali Amanat Rakyat yang berjenjang mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional yang menjalankan roda pemerintahan nasional hingga diadakan PEMILU dengan mekanisme dan sistem paska-pemilu yang telah diperbaiki.

Majelis Wali Amanat Rakyat menjalankan roda pemerintahan yang secara sistemik memperbaiki sistem yang ada, meliputi seluruh level-level yang tersebar secara demografis dan teritorial, mulai tingkat desa hingga tingkat nasional, dalam waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan semenjak keluarnya dekrit rakyat.

Demi perubahan sistemik dan total ini, seluruh elemen rakyat harus memaksa dekrit ini dikeluarkan oleh Kepala Negara dan diikuti oleh semua elemen kekuasaan politik negara.

Majelis wali amanat rakyat: Strategi REVOLUSI SISTEMIK nasional

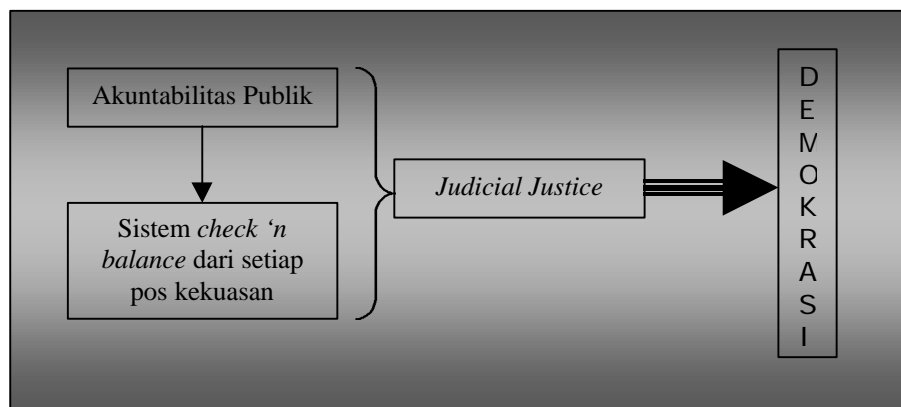
...power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely...
- Lord Acton -

1. Sekali lagi tentang demokrasi

Demokrasi secara harafiah merupakan sistem pemerintahan yang sangat membuka pintu lebar-lebar kepada arus akuntabilitas publik. Adalah naif jika kita mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah terminologi untuk kediktatoran mayoritas. Seringkali memang, sistem demokrasi diejawantahkan dalam bentuk voting atau pengambilan suara terbanyak. Namun harus diingat bahwa voting, referendum, atau apapun namanya yang sifatnya pengambilan suara terbanyak, hanyalah merupakan upaya untuk memoderasi berbagai variasi perbedaan opsi yang terjadi pada peserta sistem demokrasi. Inti terpenting dari sistem demokrasi bukanlah pada putusan yang akan diambil, namun pada aksesibilitas dan akuntabilitas terhadap semua keputusan dan sistem yang menyertai keluarnya keputusan tersebut.

Dengan kata lain, inti dari sebuah sistem pemerintahan yang demokratis adalah pada partisipasi seluruh entitas sistem tersebut terhadap setiap putusan atau kebijakan yang diambil. Inilah yang dimaknai dari prinsip (perdefinisi) demokrasi, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini pula yang membedakan antara demokrasi dengan sistem pemerintahan yang lain seperti monarki (setiap kebijakan publik (baca: kekuasaan) terletak di tangan satu orang yang disebut raja, sultan, dan sebagainya) ataupun oligarkhi/aristokrasi (pemerintahan di tangan beberapa orang saja dan bukan merupakan representasi dari seluruh publik).

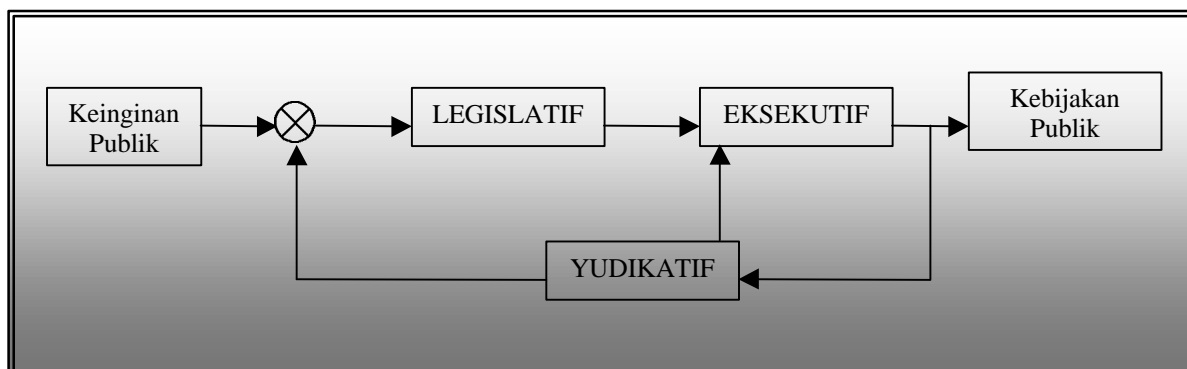
Lebih jauh, demokrasi tidak dapat diartikan sebagai pembunuhan terhadap suara minoritas; secara filosofis demokrasi tidak berhubungan dengan terminologi yang membeda-bedakan mana yang mayoritas dan mana yang minoritas. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang anti otoritarianisme dan kemungkinan kolusi/konspirasi yang sangat mungkin muncul dalam sistem monarki dan oligarkhi. Artinya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan penekanan pada fungsi kontrol atau dengan kata lain *check and balance* dari semua pos-pos kekuasaan yang ada. Dari sini diharapkan akan lahir keadilan (*justice*) yang secara mekanistik memberikan kebaikan kepada seluruh elemen masyarakat.



Sistem demokrasi secara asimtotik akan dapat tercapai saat semua elemen sistem tersebut dapat melakukan pemeriksaan dan pemberian pendapat serta berhak turut serta dalam setiap pengambilan keputusan yang akan menjadi kebijakan publik, baik secara langsung (demokrasi langsung) ataupun secara tak langsung dalam bentuk perwakilan/representasi (demokrasi tak langsung).

Filsuf yang juga menjadi pengilham revolusi Perancis (1798) mengungkapkan bahwa sistem kekuasaan yang selalu ada dalam setiap sistem pemerintahan ada tiga (Trias Politika), yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif (peradilan). Tiga pos kekuasaan ini selayaknya **terpisah** agar dapat saling menyeimbangkan sehingga roda keadilan tetap bisa dipertahankan. Suatu kenafian terjadi di negara kita saat ketiga pos ini tidak terpisah namun terdistribusi, di mana presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga memiliki "sedikit" kekuasaan legislatif (menetapkan undang-undang) dan kekuasaan hukum. Secara tidak langsung konstitusi kita memberikan pintu kepada kekuasaan sentralistik sehingga memungkinkan timbulnya pemerintahan otoriter Orde Baru.

Dengan memberikan prasyarat terjadinya sistem demokrasi, maka harus terjadi sistem yang menimbulkan *check and balance* kepada ketiga pos kekuasaan tadi. Tiap kelembagaan harus memiliki kesempatan untuk saling mengontrol di samping adanya mekanisme rakyat (sebagai pemilik kekuasaan tertinggi) untuk melakukan akses terhadap pos-pos kekuasaan tersebut. Secara sederhana mungkin dapat digambarkan sebagai sistem kontrol di bawah ini:



Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan yang sifatnya memberikan legislasi terhadap kekuasaan eksekutif. Produk yang dihasilkannya adalah produk hukum dan perundangan yang berisi rambu-rambu yang harus diikuti oleh eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan. Pos ini juga sekaligus memberikan fungsi kontrol terhadap jalannya proses hingga lahirnya kebijakan publik. Dalam sistem demokrasi tak langsung, maka lembaga legislatif ini ditempati oleh federasi atau representasi (perwakilan) dari tiap segmen/distrik publik yang ada yang terbagi secara geopolitis. Akibatnya, pos kekuasaan inilah yang secara langsung berhubungan dengan publik, yang dapat diimplementasikan dalam mekanisme *recall*, pertanggungjawaban di tingkat distrik, dan sebagainya. Jadi, dalam hal ini tiap elemen representatif lembaga legislatif harus memiliki kejelasan entitas yang diwakilinya. Dengan perkataan lain, tiap anggota dalam kelembagaan legislatif harus jelas mewakili segmen publik tertentu, sehingga publik mengetahui siapa yang mewakilinya di tingkat kelembagaan pusat. Dalam praktiknya, harus dijamininya adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat oleh setiap entitas publik, untuk kemudian nantinya dalam pengambilan keputusan, semua perbedaan tersebut dimoderasi dengan musyawarah (untuk mencapai mufakat atau aklamasi) ataupun voting, referendum, sebagai cara untuk mengumpulkan suara terbanyak yang menentukan sikap publik secara keseluruhan.

Kekuasaan Eksekutif merupakan pos kekuasaan yang mengeluarkan berbagai kebijakan yang akan berkenaan dengan publik secara langsung atau tak langsung, di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Pos inilah yang menentukan segala kebijakan sistem berdasarkan amanah yang disampaikan oleh kekuasaan legislatif. Adalah proses lahirnya segala kebijakan publik ini, legislatif harus memiliki akuntabilitas yang konkrit terhadap eksekutif. Dengan kata lain, legislatif memiliki hak-hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap proses kelahiran suatu kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif. Di sini, secara legal formal, legislatif menjadi mitra tanding (baca: oposisi) dari kekuasaan eksekutif.

Kekuasaan Yudikatif merupakan kekuasaan yang menjadi tulang punggung dari setiap roda demokratisasi pemerintahan, karena ia menjadi kekuasaan kehakiman tertinggi yang menentukan apakah kebenaran yang dianut oleh sistem tersebut ditegakkan oleh sistem tersebut. Pos kekuasaan yudikatif memiliki hak uji material dari setiap kebijakan publik yang dihasilkan oleh eksekutif berdasarkan legalitas yang diberikan oleh kekuasaan legislatif. Demi tegaknya supremasi hukum, maka pada praktiknya, kekuasaan yudikatif tidak boleh pandang bulu dalam menerapkan hukum yang ada. Dari sini, diharapkan tercipta suatu keadaan yang seadil-adilnya bagi sistem tersebut.

2. Majelis Wali Amanat Rakyat: satu-satunya jalan (?)

Keterpisahan antara elite politik dan rakyat, serta akses publik yang sangat terbatas kepada elite politiknya telah memberikan peluang bagi elite-elite politik menggunakan kekuasaan yang didapatnya untuk semakin mengokohkan kekuasaannya di panggung politik nasional dengan mementingkan kepentingan golongan/pribadinya daripada mementingkan kepentingan rakyat dan mempejuangkan aspirasi rakyat.

Majelis Wali Amanat Rakyat (MWAR) merupakan lembaga tertinggi negara yang dapat merepresentasikan kepentingan rakyat mulai dari tingkatan yang paling bawah diperlukan untuk mengatasi segala permasalahan yang terjadi pada bangsa Indonesia (masih dominannya kekuatan lama, masih kuatnya kekuatan politik militer melalui dwi fungsinya, koruptor-koruptor Orde baru yang tidak bisa disentuh oleh hukum, dan sebagainya) seperti yang telah dijabarkan sebelumnya. Lembaga ini dibentuk dengan landasan filosofis pembagian wilayah nasional berdasarkan teritori-teritori yang mengakomodasi seluruh rakyat yang direpresentasikan di dalamnya.

Lembaga ini bersifat sementara (transisional) yang fungsinya utamanya adalah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi. Ia menjadi pemberi legislasi terhadap perbaikan sistem sehingga secara cepat dan tidak menimbulkan pertumpahan darah berbagai permasalahan bangsa akan dapat diatasi secara sistematis dan elegan. Ia memiliki tugas utama untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih aspiratif dan akomodatif terhadap seluruh kepentingan masyarakat secara luas dan menyelenggarakan PEMILU dalam kurun waktu sekitar 2 bulan semenjak terbentuk dan mengesahkan pemerintahan baru yang akan memerintah dengan sistem yang telah ditetapkan dengan sistem *check and balance* serta aspiratif terhadap keinginan publik.

Pembentukan lembaga tersebut dimulai dari tingkatan desa/kelurahan di mana setiap perwakilan yang akan duduk adalah perwakilan dari setiap RW yang dipilih oleh masyarakat setempat melalui mekanisme yang dirasa adil oleh masyarakat setempat (apakah itu pemilu, musyawarah desa, dll). Lembaga ini kemudian dinamai **Majelis Wali Amanat Tingkat Desa**. Perwakilan dari setiap desa dipilih untuk duduk di **Majelis Wali Amanat tingkat Kecamatan**, dari kecamatan ke kabupaten/kota, dan seterusnya sampai tingkat nasional. Lembaga ini sebagai penyelenggara pemerintahan transisi yang nantinya diharapkan akan membentuk badan-badan pekerja yang mempunyai fungsi-fungsi sebagai legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Eksekutif : menyelenggarakan fungsi-fungsi administratif pemerintahan,

Legislatif : merevisi kembali undang-undang dan segala peraturan peninggalan orde baru, pengaturan dwi fungsi TNI/POLRI, RUU Pemilu, RUU Politik, dan sebagainya.

Judikatif : menyelenggarakan pengadilan terhadap orang-orang yang terlibat praktek KKN pada masa Orba.

Peran dan Fungsi-fungsi tersebut dimulai dari tingkatan Majelis Wali Amanat tingkat Desa sampai tingkat Nasional. Majelis Wali Amanat Tingkat Desa akan bersidang untuk menentukan kepentingan-kepentingannya yang akan diperjuangkan oleh wakilnya yang duduk ditingkat kecamatan. Majelis Wali Amanat Tingkat Kecamatan akan bersidang dan menentukan kepentingan-kepentingannya yang akan diperjuangkan oleh wakilnya yang duduk ditingkat kabupaten/kota. Dan seterusnya hingga tingkatan Nasional. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam Majelis Wali Amanat tersebut bisa diganti setiap saat melalui mekanisme *recall* dari publik pemilihnya bahkan dari tataran paling rendah sekalipun (Majelis Wali Amanat tingkat Desa). Dengan demikian, rakyat akan selalu berdaulat dan kedaulatan rakyat tetap dijunjung tinggi.

Fungsi yudikatif juga berlaku dari mulai tingkatan paling rendah, yaitu desa (mahkamah rakyat tingkat Desa). Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara langsung kepada Mahkamah Rakyat tingkat Desa, jika menemui berlangsungnya praktek KKN di daerahnya baik yang dilakukan perseorangan maupun kelompok. Begitu juga ditingkatan kecamatan, Kabupaten, sampai tingkat Nasional.

Permasalahan	Solusi melalui Majelis Wali Amanat
Sulitnya pengadilan terhadap penjahat Orde Baru	Laporan dan gugatan masyarakat terhadap prjahat Orba yang melakukan tindakan KKN dapat dilakukan dari mulai tingkatan yang paling rendah, yaitu desa. Hal ini dapat memudahkan masyarakat dalam
Dominannya peran politik militer	Revisi terhadap UU/keputusan politik nasional yang menjadi aturan baku dalam sistem perpolitikan pada era Orde Baru dimungkinkan terjadi. Apalagi MWA Nasional merupakan suatu bentuk representasi pemerintahan negara oleh sipil, dan militer tidak lagi mempunyai kesempatan untuk masuk kedalam Majelis Wali Amanat Nasional.
Terputusnya Akses Publik ke Elit	Publik dari ingkatan yang paling bawah sekalipun dapat mengakses wakilnya melalui Majelis Wali Amanat di daerahnya, dimungkinkannya mekanisme recall dari tingkatan massa terendah sekalipun (Desa), serta dukungan media massa dan media informasi lainnya.

3. Memilih Wakilnya di MWAR

Di tingkat desa (dan atau elemen (organisasi) terkecil masyarakat¹), diadakan sidang rakyat tingkat desa yang akan berisidang untuk memilih (3 (atau kelipatan tiga) orang) wakil-wakilnya yang duduk di MWAR Desa. Rakyat memilih sendiri wakilnya dengan mekanisme yang disepakati bersama dengan *screening* yang

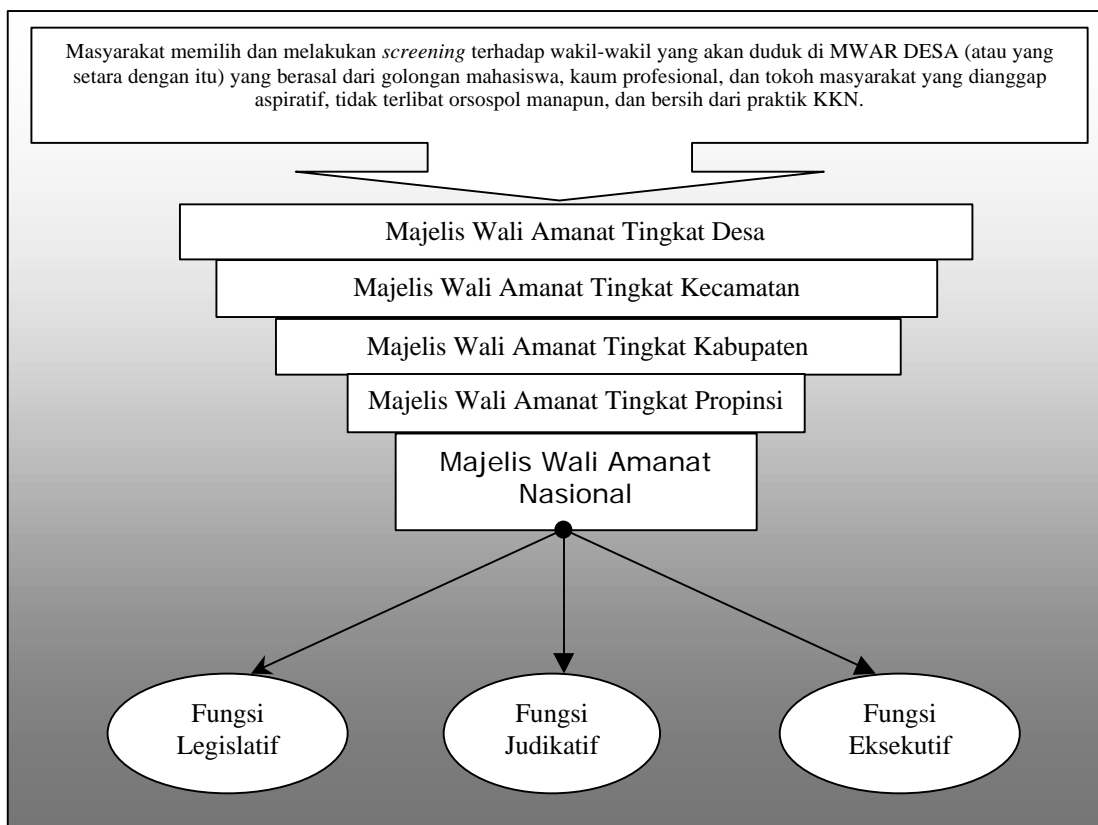
¹ Satu desa dapat dihitung sebagai sekumpulan RW atau sebuah organisasi lain yang setara dengan desa tersebut, misalnya perguruan tinggi, buruh di perusahaan (dengan serikat buruhnya), dan sebagainya dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

dilakukan untuk itu, agar wakil rakyat yang duduk di sana benar-benar terpercaya dan bersih dari segala praktik korupsi tingkat desa yang bersangkutan. Yang diperbolehkan duduk di sana, kurang lebih adalah **mahasiswa** yang teruji kapabilitasnya dan bersih dari segala praktik KKN dan tidak terlibat partai politik manapun, **kaum profesional** yang berusia tidak lebih dari 30 tahun dan tidak terlibat dalam organisasi politik apapun, serta **tokoh masyarakat** setempat yang dipercaya oleh masyarakat desa untuk dapat mewakilinya secara aspiratif. Rakyat sendiri akan menguji dan memperhatikan tindak tanduk wakil-wakil mereka tersebut apakah masih aspiratif atau tidak, dan jika tidak akan diadakan sidang MWAR Desa yang *me-recall*-nya dan menggantinya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan metodologi ini, diharapkan keterlibatan langsung masyarakat hingga lapisan terbawah untuk memperhatikan situasi politik yang ada termasuk di jenjang yang ada di atasnya.

MWAR Desa akan bersidang dan memilih wakilnya yang akan duduk di MWAR Kecamatan, dan kriteria sebelumnya tetap berlaku dengan pengawasan di tingkat paling elementer masyarakat. Demikian seterusnya hingga terpilih wakil-wakil di MWAR Kabupaten, MWAR Propinsi, dan MWAR tingkat Nasional (MWARN).

Di tiap level MWAR dari desa hingga nasional dibag-bagi lagi atas kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif dengan tugas-tugas yang bersesuaian dengan itu. Secara legislatif ia memperbaiki sistem pemerintahan levelnya. Eksekutif mengatur administrasi dan birokrasinya, dan yudikatif menyelenggarakan pengadilan (mahkamah) rakyat tingkat levelnya untuk kejahatan-kejahatan birokrasi atau pidana yang dilakukannya.

Di tingkat nasional, MWARN juga dibagi dalam tiga pos kekuasaan. Legislatif melakukan sidang-sidang untuk membentuk dan menetapkan konstitusi baru, sistem Pemilu baru, cara berpolitik yang baru, dan seterusnya. Eksekutif menjalankan administrasi negara serta berbagai hal primer yang ditetapkan dalam sidang pleno MWARN. Yudikatif menyeret berbagai kejahatan tingkat nasional selama Orde Baru sesuai pengaduan rakyat untuk itu. Kesemua anggota MWARN dibantu oleh berbagai intelektual dan pakar (tenaga ahli) yang dipilih oleh MWARN untuk membantunya dalam persidangan.



4. Recall terhadap anggota MWAR

Jika ternyata sudah tidak berada dalam koridor aspirasi rakyat lagi, maka di level yang bermasalah itu akan diadakan sidang sesuai pengaduan untuk itu. Sidang itu akan menyerahkan anggota MWAR yang bermasalah tersebut kembali ke daerahnya bila ternyata memang dalam sidang tersebut ia terbukti telah bersalah, dan segera MWAR level di bawahnya bersidang untuk memilih penggantinya, demikian seterusnya hingga tingkat MWAR Desa.

Tiap elemen rakyat akan menyaksikan jalannya persidangan dan ini akan mengundang mobilisasi rakyat yang akan meningkatkan animo masyarakat terhadap kondisi sosial politik yang ada dan secara sadar dapat mengaspirasikan keinginan dan tuntutan, mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional.

MWAR akan menetapkan segala sesuatu secara pleno dan langsung dikoreksi aspirasifitasnya oleh publik.

5. Panitia Pelaksana PEMILU MWAR

Tentu saja akan ada resistensi besar-besaran oleh mereka yang akan diusik kedudukan dan kenyamanan posisinya selama ini. Dan posisi mereka selama ini diperlengkapi oleh berbagai jaringan yang mengatur segala proses yang terjadi dalam masyarakat. Di sinilah letak pentingnya butir pertama dekrit rakyat tersebut, bahwa TNI/POLRI harus ikut menyukseskan jalannya pemerintahan transisional ini.

Dalam tataran teknis pelaksanaannya, PEMILU di tingkat desa hingga tingkat nasional perlu memiliki standardisasi pelaksanaannya, dan pelaksanaannya langsung menjadi pegawai negara yang ditetapkan oleh keterangan yang diatur dalam Dekrit Rakyat tersebut. Panitia yang diusulkan untuk ini adalah elemen mahasiswa dengan menggunakan akses perguruan tinggi se-Indonesia sebagaimana yang pernah dilakukan pada sistem pengawasan PEMILU 1999 yang lalu.

Setiap kandidat dan panitia yang ditunjuk untuk itu langsung diawasi oleh rakyat sehingga setiap ada kecurangan dapat ditindak secara tegas untuk menghasilkan perbaikan sistem yang dikehendaki bersama.

6. Penutup

Ini adalah sebuah diskursus, bagaimana menggabungkan suatu pola perjuangan kultural dan struktural dalam masyarakat.

Ini adalah juga merupakan diskursus untuk memperbaiki sistem yang ada secara sistematis dan terpadu, yang akan menyisir semua penjahat-penjahat birokrasi yang bercokol selama ini dan tak satupun hukum nasional mampu menjeratnya.

Ini juga adalah diskursus untuk mengembalikan kepada rakyat kontrak sosial sehingga tiap elemen masyarakat menyadari dan merasa dirinya sebagai bagian kecil dari sebuah wahana besar bernama Indonesia....

Berhasil tidaknya upaya revolusi sistemik ini bergantung dari kematangan konsepsi ini yang tentu akan melibatkan elemen rakyat yang memiliki kedalaman disiplin ilmu untuk ini, serta upaya bersama bagaimana mewujudkan hal ini secara nasional. Pers sebagai kekuatan pembentuk opini masyarakat merupakan elemen dasar terpenting yang harus mendukung terlaksananya konsepsi ini.